

Kumpulan Opini untuk Literasi

ORASI STATISTIK

BPS PROVINSI SUMATERA UTARA

2023



**Kumpulan Opini untuk
Literasi Statistik
BPS Provinsi Sumatera Utara
2023**

<https://sumut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Kumpulan Opini untuk Literasi Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara 2023

Nomor Publikasi : 12000.2373
Nomor Katalog : 1205051.12
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : viii+66 Halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Gambar Kover :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Diterbitkan oleh :
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Dicetak oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Kumpulan Opini untuk Literasi Statistik
BPS Provinsi Sumatera Utara 2023

Pengarah:

Nurul Hasanudin

Penanggung Jawab:

Pendi Dewanto

Penyunting:

Eva Julieta Tamba

Penulis Opini:

Liza Aufia Utami Br Ginting

Aan Budhi Willyana

Dwina Wardhani Nasution

Jimmy Saputra Sebayang

Ragdad Cani Miranti

Marlina Naibaho

Ridho Julandra

Erfin Triyaman Harefa

Kompilasi:

Didit Puji Hariyanto

Kover/Tata Letak:

Didit Puji Hariyanto

KATA PENGANTAR


Publikasi ORASI Statistik “Kumpulan Opini untuk Literasi Statistik” kembali dirilis untuk edisi ketiga. Kumpulan opini penulis BPS Provinsi Sumatera Utara yang terangkum selama tahun 2023 menggambarkan heterogenitas ide dan pemikiran yang terangkum menjadi satu.

Data dan statistik berbicara melalui tulisan para statistisi. Curahan pemikiran dan sudut pandang tertuang dalam opini yang disajikan melalui media massa. Pada publikasi ini, statistisi di Sumatera Utara pada tahun 2023 telah menghasilkan tulisan sebanyak 15 artikel dari 8 penulis yang telah dimuat di media massa lokal maupun nasional.

Merangkai kalimat dan menyusunnya dalam bentuk opini populer merupakan salah satu bagian dari pengembangan profesi pegawai di lingkungan BPS. Mencermati fenomena dan isu yang sedang terjadi di masyarakat dan menganalisa dari sudut pandang yang spesifik akan meningkatkan ketajaman berpikir dan memecahkan masalah (*Problem Solving*). Tentu ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat umum untuk dapat lebih mengenal dan dekat dengan data dan statistik.

Buku ini merupakan apresiasi saya sebagai pimpinan kepada penulis-penulis BPS Provinsi Sumatera Utara. Saya berharap keberlanjutan publikasi ini dapat direalisasikan hingga tahun-tahun mendatang untuk membuka ruang berkarya dan berinovasi di tengah padatnya rutinitas. Teruslah menginspirasi bangsa dengan kemampuan literasi dan jangan pernah berhenti mencoba, membekali diri dengan ilmu-ilmu baru yang berkembang saat ini sehingga tidak tergerus oleh arus digitalisasi. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, baik dari kalangan BPS, pemangku kebijakan, akademisi maupun masyarakat Provinsi Sumatera Utara secara umum.

Medan, Desember 2023
Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara



— Nurul Hasanudin

SEKAPUR SIRIH


"You can make anything by writing", - C.S. Lewis

Dengan menulis, kita dapat mencurahkan segalanya. Gagasan, ide, intuisi, dan sudut pandang dapat tersampaikan dengan baik dan terstruktur melalui tulisan. Mencermati suatu objek dan menarik kesimpulan terhadap suatu masalah juga dapat dituangkan melalui tulisan. Menulis memperkaya khazanah wawasan dan ilmu pengetahuan. Di era disrupsi teknologi, banyak sumber informasi yang didapat diolah menjadi tulisan yang bermakna, baik yang bersumber dari data dan statistik resmi maupun dari sumber data baru (*Big Data*). Literasi dan pengayaan akan data semakin dibutuhkan agar semakin kuat menghadapi transformasi yang masif.

BPS Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya mewadahi potensi dan kompetensi para pegawai yang ingin terus berkarya. Melalui publikasi ORASI Statistik yang diterbitkan untuk ketiga kalinya, kami berharap semangat pegawai tetap terjaga untuk menyampaikan data dan statistik dengan lebih luwes dan ringan. Membunyikan data dan mendiseminasikan dengan cara yang lebih dekat dan menyentuh masyarakat merupakan tantangan bagi para punggawa statistik. Kebermanfaatan data dan statistik yang dihasilkan lewat tulisan-tulisan berkualitas di media massa. Melalui tulisan-tulisan yang disematkan pada media massa pula, masyarakat dapat mengenal lebih dekat dengan BPS sebagai lembaga penyedia statistik resmi terpercaya.

Semoga tulisan yang tertuang dalam publikasi ini menjadi pemantik kobaran semangat dan sebagai langkah nyata dalam berkarya dan memberi motivasi kepada pegawai-pegawai lain di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pimpinan yang telah membimbing, mendukung, dan memberi wadah kepada penulis untuk mengembangkan kompetensi dan menguntai karya dalam sebuah buku bermakna.

Medan, Desember 2023
Ketua Tim Bidang NAWAS



Pendi Dewanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
SEKAPUR SIRIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1. EKONOMI	1
MEMANTIK OPTIMISME EKONOMI SUMATERA UTARA.....	3
EKONOMI SIRKULAR UNTUK PERTANIAN BERKELANJUTAN	7
WASPADAI JEBAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI.....	11
BAB 2. PERTANIAN	15
MENGUJI RESILIENSI PERTANIAN REGIONAL.....	17
ADA APA DENGAN BERAS?.....	21
BAB 3. UMKM	25
SINERGI MENUJU SATU DATA UMKM	27
MENYOAL DATA UMKM.....	31
BAB 4. SOSIAL	35
GURU BERKUALITAS UNTUK PENDIDIKAN BERKUALITAS	37
TREN DIGITALISASI DI INDONESIA	39
PENUAAN PENDUDUK DAN POTRET LANSIA INDONESIA	43
BAB 5. KUALITAS DATA	47
KEBIJAKAN BERBASIS DATA BERKUALITAS.....	49
STATISTIK BERKUALITAS UNTUK INDONESIA MAJU.....	53
BAB 6. PENYELENGGARAAN STATISTIK	57
MENYOAL SPBE DAN AMANAT SDI.....	59
DATA SEKTORAL DAN IMPIAN GOOD GOVERNANCE	62
DATA MANTAP PEMBANGUNAN	64

BAB I

Ekonomi



MEMANTIK OPTIMISME EKONOMI SUMATERA UTARA

Oleh : Ragdad Cani Miranti

Ringkasan

Transformasi pasca pandemi telah berhasil mendorong pendorong perekonomian kembali pulih. Percepatan performa ekonomi berhasil diraih. Tidak hanya indikator ekonomi saja yang kembali menguat, indikator sosial dan strategis lainnya beriringan mengikuti. Adaptabilitas masyarakat menghadapi tekanan harga dan dinamika ketenagakerjaan selama pandemi telah teruji. Kini, optimisme di tahun 2024 menuju kebangkitan dan ketahanan ekonomi yang lebih kuat menjadi pegangan.

Kata kunci: kinerja ekonomi, ketenagakerjaan, pembangunan manusia, optimisme

Tahun 2023 adalah momentum percepatan berbagai aktivitas sosial ekonomi global. Prospek perekonomian nasional hingga regional secara gradual terlihat menggairahkan. Hal ini tercermati dari semakin kondusifnya berbagai indikator ekonomi yang menggiring optimisme percepatan ekonomi Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat geliat pertumbuhan ekonomi terus menguat dan terpantau stabil mulai dari triwulan I-2023 hingga triwulan III-2023. Tentunya hal ini menjadi kabar baik dan diharapkan menjadi *benchmark* perekonomian tahun-tahun mendatang. Secara prinsip, akselerasi pertumbuhan ekonomi disokong dari dua sisi, yaitu dari sisi pengeluaran dan kinerja produksi atau lapangan usaha. Dari perspektif pengeluaran, akselerasi ditandai oleh konsumsi rumah tangga yang terus meningkat serta terjaganya kinerja perdagangan dan investasi. Dari perspektif lapangan usaha, seluruh sektor mengalami pertumbuhan, terutama sektor-sektor riil yang melibatkan pemanfaatan digitalisasi.

Indikator Ekonomi Masih Kondusif

Skenario yang bergulir selama tahun 2023 menunjukkan perekonomian yang membaik dengan tren meningkat tiap triwulan. Dibandingkan dengan triwulan III-2022 lalu, BPS mencatat ekonomi Sumatera Utara Triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen (*y-on-y*) dan diprediksi terus tumbuh hingga triwulan-IV 2022. Kondisi ini didukung oleh laju yang pesat pada aktivitas transportasi dan perdagangan sebesar 12,41 persen pada triwulan-III 2023. Tingkat mobilitas masyarakat yang tak terbandung menjadi salah satu penyebab. Di samping itu, transaksi barang dan jasa yang dilakukan secara *online* maupun *offline* juga meningkat. Menguatnya ekonomi pada kuartal

III juga disebabkan oleh gencarnya aktivitas lembaga non-profit rumah tangga yang mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 8,72 persen.

Lebih jauh dari itu, posisi dan kontribusi Sumatera Utara pada perekonomian Pulau Sumatera juga memberikan kesan baik. Secara spasial, Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto Sumatera sebesar 23,35 persen, disusul oleh Provinsi Riau yang menduduki peringkat kedua dengan *share* sebesar 22,34 persen. Kontribusi ini tak lepas dari peran besar sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang membangun dan menyokong struktur ekonomi Sumatera Utara selama setahun terakhir.

Kondusifnya perekonomian Sumatera Utara juga ditandai dengan terjaganya inflasi selama setahun terakhir. Dilansir dari *Antara News*, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan predikat pengendalian inflasi terbaik. Ini dibuktikan dengan terkendalinya inflasi Sumatera Utara per bulan Agustus dan September 2023 di angka 2,78% dan 2,15% (*y-o-y*). Pencapaian ini cukup mengagumkan sebab inflasi Sumatera Utara tercatat lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,27% dan 2,28% pada periode yang sama.

Gayung bersambut, pemulihan ekonomi Sumatera Utara juga selaras dengan dengan penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara. Data BPS menunjukkan terjadinya penurunan angka kemiskinan dari 8,42 pada Maret 2022 menjadi 8,15 persen pada Maret 2023. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga ikut mengalami penurunan. Dari sisi ketimpangan pendapatan antar dua kategori wilayah, ketimpangan penduduk daerah perkotaan masih relatif lebih tinggi dibandingkan ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan. Tentunya ini dapat menjadi fokus pemerintah ke depan dalam menciptakan pemerataan pendapatan kesejahteraan di segala penjuru.

Ketenagakerjaan Membaik

Sejalan dengan pulihnya perekonomian domestik di Sumatera Utara, momentum ini menjadi *trigger* baik yang mendukung peningkatan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara. Fenomena ini terekam dari laporan Berita Resmi Statistik yang menunjukkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta peningkatan jumlah tenaga kerja dibandingkan kondisi Agustus 2023. TPT Agustus 2023 tercatat sebesar 5,89 persen, turun sebesar 0,27 persen poin dibandingkan dengan TPT Agustus 2022. Sementara itu, partisipasi angkatan kerja juga mengalami peningkatan sebesar 1,53 persen poin menjadi 71,06 persen pada tahun 2023. Dari sisi struktur pekerja, terdapat pergeseran (*shifting*) dimana jumlah tenaga kerja yang bergerak di sektor informal menurun dari 59,07 persen pada Agustus 2022 menjadi 58,52 persen pada tahun 2023. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa pulihnya ekonomi membuka peluang untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih luas, terlebih pada beberapa sektor yang menunjukkan penguatan secara masif.

Pembangunan Manusia Meningkat

Kemajuan perekonomian idealnya sejalan dengan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah. Status pembangunan manusia yang baik diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan pembangunan modal manusia dapat mendukung pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan. Salah satu indikator yang dapat mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia. Selama 10 tahun terakhir, secara rata-rata pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Akan tetapi, selama pandemi Covid-19, capaian pembangunan manusia sempat mengalami perlambatan. Kini, secara bertahap, level pembangunan manusia mengalami percepatan di tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 0,99 persen.

Tidak hanya itu, beberapa indikator kualitas hidup masyarakat seperti usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita juga mengalami percepatan pertumbuhan di tahun terkini. Semua komponen penyusun kualitas hidup manusia mengalami peningkatan. Pengeluaran riil per kapita penduduk di Sumatera Utara merupakan variabel yang menunjukkan akselerasi tertinggi pada tahun 2022. Pada 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan telah meningkat 3,32 persen dibanding 2021.

Ekonomi Bangkit, Sumut Hebat

Membangun fondasi jangka menengah dari perekonomian Sumatera Utara menjadi narasi besar yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik di penghujung tahun 2023. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kenaikan harga barang terkhusus bahan makanan yang memiliki sifat *volatile*. Masih segar di ingatan ketika lonjakan harga minyak goreng menjadi isu nasional. Belum lagi kenaikan harga BBM yang sempat membuat warga panik. Namun, waktu membuktikan bahwa masyarakat dapat beradaptasi. Daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, peran pengambil kebijakan juga berpengaruh dalam menentukan kestabilan transaksi ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter dan fiskal telah diterapkan untuk menjaga agar harga tetap terkendali dan daya beli tetap terjaga.

Tidak cukup sampai disitu, menyongsong pesta demokrasi 2024, optimisme kebangkitan ekonomi semakin terasa. Aktivitas dari berbagai pelaku politik dan kegiatan organisasi masyarakat akan berdampak positif pada perekonomian. Walaupun dalam perjalanannya penuh dinamika, baik dari faktor internal maupun eksternal, indikator-indikator sosial ekonomi yang terjaga baik dapat menjadi bantal ekonomi negara. Berkaca pada pengalaman, dukungan dari segenap lapisan sangat dibutuhkan. Kesiapan industri yang kompetitif, penguatan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur dapat menjadi penguat langkah ke depan. Implementasi ekonomi dan pembiayaan hijau dapat

digalakkan. Dengan demikian, kebangkitan ekonomi Sumatera Utara di tahun mendatang tidak hanya menjadi angan. Semangat dan optimisme menuju ekonomi Sumatera Utara yang lebih baik!

[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2023/11/29/175357/memantik_optimisme_ekonomi_sumatera_utara/

<https://sumut.bps.go.id>

EKONOMI SIRKULAR UNTUK PERTANIAN BERKELANJUTAN

Oleh : Aan Willyana

Ringkasan

Tulisan ini mengulas tentang perjalanan pertanian di Indonesia serta transformasi yang terjadi dalam pola pertanian tradisional hingga masa kini. Pertanian sirkular memberi pandangan baru tentang pola pertanian yang tidak mengabaikan keseimbangan alam, sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal. Pemerintah juga mengambil peran penting dalam hal kebijakan yang erlu ditempuh, serta bagaimana BPS melalui Sensus Pertanian merupakan salah cara untuk mendapatkan informasi tepat dan terkini.

Kata kunci: *pertanian sirkular, pertanian Indoensia, Sensus Pertanian*

Gemah ripah loh jinawi. Ungkapan ini kurang lebih mengandung makna tenteram dan makmur serta sangat subur tanahnya. Senada dengan lantunan Koes Ploes dalam lirik lagunya "Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman...".

Indonesia, sebagai negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa merupakan salah satu dari sedikit negara yang beroleh anugerah sebagai negara beriklim hutan hujan tropis. Siklus empat musim yang sangat menguntungkan dan memperkaya sumber daya alam menjadi satu manfaatnya, juga kesempatan untuk dapat menikmati matahari sepanjang tahun. Iklim yang mendukung tumbuh berkembangnya aneka ragam hayati, baik di sepanjang daratan hingga dasar lautan.

Namun demikian, berbicara tentang petani di negeri ini belumlah semenarik kondisi petani di benua seberang yang identik dengan perekonomian yang cenderung mapan. Petani di negeri ini masih mengisyaratkan kelompok umur tua, pedesaan, tanah, kotor dan barangkali cenderung miskin. Menurut data BPS, pada Sensus Pertanian 2013 tercatat lebih dari 26 juta rumahtangga pertanian tersebar di seluruh Indonesia dengan wilayah dominan Jawa dan Sumatera Utara. Diantara rumahtangga pertanian tersebut, lebih dari 60 persen petani utamanya berada di rentang usia 45 tahun ke atas.

Transformasi Pertanian Indonesia

Pertanian di Indonesia sebenarnya telah mengalami beberapa *phase* perubahan. Pada mulanya, mungkin pertanian dilaksanakan secara tradisional, baik secara alat dan perlengkapan maupun pengetahuan yang dimiliki. Dari alam kembali ke alam, namun bertitik berat pada pasrah, karena tanah dan segala yang dihasilkan olehnya merupakan anugerah dari Yang Kuasa.

Seiring dengan berjalannya waktu, munculnya revolusi telah menciptakan berbagai temuan-temuan baru. Alat bantu di bidang pertanian telah merubah pola tanam tradisional dan berubah menjadi modern, namun cenderung konvensional. Sistem pertanian menjadi lebih intensif dan menitikberatkan pada salah satu jenis tanaman tertentu dengan memanfaatkan inovasi teknologi dan penggunaan input luar yang tinggi untuk memperoleh output yang lebih banyak, dan dalam waktu yang relatif singkat. Prinsip ekonomi dan bisnis mulai merambah dan mengeksploitasi dunia pertanian. Pola pertanian konvensional cenderung berjalan linier dengan pengrusakan yang berakibat pada ketidakseimbangan sumber daya alam. Lingkungan yang semakin terdegradasi dalam skala masif, sumber air yang terkontaminasi keberadaan pupuk non organik yang beranekaragam, pola tanam yang cenderung memaksakan hasil dan tidak memedulikan kejenuhan tanah. Kesemuanya semakin membentangkan kesenjangan yang tinggi antara manusia dan alam sekitar.

Hadirnya pertanian organik sebagai pelopor pertanian yang berkelanjutan merubah pola pikir dan kembali mempertimbangkan lingkungan sekitar. Pertanian organik menjadi alternatif solusi bagi masalah penurunan produktivitas lahan pertanian akibat revolusi hijau. Dalam jangka panjang, produktivitas lahan pertanian organik dapat lebih tinggi atau setidaknya sama dengan produktivitas lahan pertanian konvensional.

Meskipun demikian, *barriers to entry* untuk memasuki usaha ini dinilai cukup besar. Biaya konversi lahan, dan lain-lain hingga komponen *labor cost* dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional. Hal ini cukup untuk menimbulkan pertanyaan, apakah sistem *organic farming* ini akan mampu bertahan dan bersaing secara ekonomis dengan sistem konvensional yang telah berdekade menjadi tumpuan pemberi makanan bagi penduduk dunia.

Pertanian Sirkular

Saat ini, Indonesia telah mengadopsi konsep Ekonomi Sirkular ke dalam visi Indonesia 2045 dan RPJMN 2020-2024. Dalam ekonomi sirkular, alam merupakan hal yang penting dan utama. Manusia merupakan bagian dari alam, oleh sebab itu segala hal yang dilakukan oleh manusia, dilakukan sebagaimana alam melakukannya.

Ekonomi sirkular merupakan model pembangunan nasional yang berprinsip pada 5R: *Reduce* (mengurangi hingga mencukupkan segala sesuatu yang dikonsumsi), *Re-use* (menggunakan kembali

segala sesuatu yang masih mungkin dipergunakan), *Refurbish* (merenovasi ataupun memperbaharui), *Repair* (memperbaiki bagian yang rusak baik sebagian ataupun seluruhnya sehingga dapat digunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang sehingga dapat dimanfaatkan kembali). Kesemua hal tersebut mengarah pada tujuan pengurangan konsumsi sumber daya primer serta produksi limbah yang berlebihan sehingga diharapkan dapat mencapai kemungkinan *zero waste*.

Demikian juga dalam hal pertanian. Kerusakan alam, kekeringan, banjir, tanah longsor, dan sebagainya, mampu merubah cara pandang manusia. Merusak alam dan mengabaikan daya dukung alamiah menimbulkan hukum alam yang berarti kehancuran bagi manusia itu sendiri. Manusia selama ini menghendaki tonase hasil panen yang tinggi, keuntungan yang besar serta mengutamakan prinsip ekonomi, sehingga secara tidak langsung merusak alam sekitar.

Prinsip utama dari pertanian sirkular adalah pemanfaatan sumberdaya yang ada. Termasuk diantaranya buangan limbah yang pada umumnya dianggap tidak bernilai dan dibuang ke alam, bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang baik dan termanfaatkan secara tepat. Salah satu proses sederhana dalam siklus yang pendek adalah keberadaan lahan tanaman pertanian pangan dan pemeliharaan ternak. Saat tanaman pangan dipanen untuk kecukupan kebutuhan manusia, sisa tanaman digunakan untuk bahan baku pakan ternak ataupun diolah menjadi pupuk. Di sisi lain, kotoran yang dihasilkan hewan diolah kembali menjadi pupuk tanaman maupun biogas sebagai alternative bahan bakar rumah tangga. Demikian seterusnya proses itu akan berulang terus menjadi sebuah siklus yang tertutup.

Dipadupadankan dengan teknologi baru dan modern, harmonisasi antara kebutuhan manusia dan lingkungannya seharusnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Antar elemen saling menyokong dan bergerak beriringan tanpa merusak, namun saling menutupi satu sama lain. Keberlanjutan kelangsungan hidup manusia diharapkan dapat terjaga dan lestari dengan dukungan alam yang terus memproduksi.

Peran Pemerintah

Data merupakan hal yang paling mendasar yang seharusnya menjadi landasan kebijakan Pemerintah. Pada Juni-Juli tahun 2023 ini, Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik akan kembali melaksanakan Sensus Pertanian (ST2023). Sensus ini bertujuan untuk menyediakan data struktur pertanian hingga wilayah terkecil di seluruh Indonesia. Tersedianya data Statistik Pertanian baik dalam bentuk tabular maupun geospasial menjadi salah satu outcome yang diharapkan dari hasil ST2023. Keberadaan data pertanian yang komprehensif hingga wilayah kecil sampai level desa, serta terpenuhinya data pertanian untuk mendukung agenda global, seperti Indikator SDGs di Sektor Pertanian.

ST2023 juga memberikan perhatian khusus untuk menangkap isu strategis pertanian nasional yang mengacu pada RPJMN dan berdampak pada pengambilan keputusan strategis pemerintah. Keterbatasan indikator pertanian, menjadikan pemerintah mencermati NTP (Nilai Tukar Petani) sebagai salah satu target untuk melihat kesejahteraan petani, meski hal ini kurang tepat menurut pendapat beberapa pakar.

Berbagai target outcome ST2023 tersebut membuktikan bahwa betapa pentingnya data pertanian bagi suatu negara khususnya Indonesia yang merupakan negara agraris. Data dan informasi yang tepat dan akurat merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam membuat perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang pertanian. Data seperti lentera dan kompas, akan menjadi penerang dan penunjuk arah ke mana negara ini melangkah. Sukseskan Sensus Pertanian 2023 dengan memberikan jawaban yang sebenar-benarnya kepada petugas pendata.

[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

<https://analisadaily.com/e-paper/2023-03-30/files/assets/basic-html/index.html#11>

WASPADAI JEBAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh : Aan Willyana

Ringkasan

Tulisan ini mengulas tentang bagaimana pemaknaan mendalam terkait pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat menyejahterakan rakyatnya yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari sebuah negara, bukan hanya terkait besarnya, namun juga cakupannya.

Kata kunci: *pertumbuhan ekonomi, perekonomian*

Pertumbuhan ekonomi hampir selalu dikaitkan dengan penilaian akan kemajuan suatu wilayah, kondisi perekonomian, bahkan kesejahteraan masyarakatnya. Besaran pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mengelola wilayah dan upaya menyejahterakan warganya. Persistensi terhadap guncangan dampak pandemi juga dilihat dari kestabilan pertumbuhan ekonomi selama periode waktu tersebut. Mungkin tidak salah, namun hal tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli

Prof. Simon Kuznet, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam hal kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Selanjutnya M. P. Todaro, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar.

Secara sederhana, Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah besarnya persentase perubahan PDB/PDRB pada tahun berjalan terhadap PDB/PDRB pada tahun sebelumnya. PDB (Produk Domestik Bruto) digunakan untuk tingkat nasional, sedangkan di tingkat regional dikenal istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pendekatan Penghitungan PDB/PDRB

Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penghitungan PDB/PDRB, yaitu Pendekatan Produksi (*Production Approach*), Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*), dan Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*).

Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau meningkatkan nilai tambah (*value added*). PDB/PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan besarnya nilai tambah yang diperoleh dari berbagai aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi (*output*) dan biaya antara (biaya yang habis dipakai selama proses produksi) dari suatu produk, baik barang maupun jasa.

Berdasarkan pendekatan pendapatan, PDB/PDRB dihitung dengan cara menjumlahkan tingkat balas jasa bruto (sebelum dikurangi pajak) dari faktor produksi yang dipakai. Namun kenyataannya, hal ini sangat susah terealisasi karena sulitnya menentukan pendapatan masyarakat yang sebenarnya. Selanjutnya dilihat berdasarkan pendekatan pengeluaran, PDB/PDRB adalah berasal dari jumlah seluruh permintaan akhir atas barang dan jasa (pengeluaran konsumsi akhir dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor minus impor atas barang dan jasa.

PDB/PDRB, dengan pendekatan manapun, selalu dihitung dan disajikan dengan dua cara, yaitu 'atas dasar harga berlaku' (ADHB) dan 'atas dasar harga konstan' (ADHK). PDB/PDRB atas dasar harga berlaku (PDB/PDRB ADHB) atau dikenal juga sebagai PDB/PDRB Nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan (*current price*), baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah. PDB/PDRB atas dasar harga konstan (PDB/PDRB ADHK) atau dikenal juga sebagai PDB/PDRB Riil menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu yang disebut sebagai tahun dasar, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.

Dalam menilai suatu pertumbuhan ekonomi yang berbasis produksi (PDB/PDRB), faktor pengaruh harga harus dihilangkan. Oleh karena itu, walaupun PDB/PDRB ADHB dapat dihitung laju pertumbuhannya juga, namun untuk melihat kinerja ekonomi, yang digunakan adalah laju pertumbuhan PDB/PDRB ADHK.

Pendapatan Domestik

Pada prinsipnya, semua barang dan jasa yang merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Hal tersebut tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari daerah tersebut ataupun dimiliki oleh penduduk yang tinggal di daerah tersebut,

Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi yang ada di suatu daerah berasal dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Demikian juga sebaliknya, faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut bisa jadi terlibat dalam proses produksi yang ada di daerah lain atau di luar negeri sekalipun.

Hal ini yang menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dan tidak bisa disamakan atau diidentikkan dengan pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah tersebut. Dengan kata lain, bukan merupakan gambaran kesejahteraan penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu.

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas selalu menjadi pe-er kita bersama. Penentuan skala prioritas dalam sebuah perencanaan pembangunan menjadi penentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam ekonomi akan ada *trade-off* dan *lag* terhadap pencapaian pertumbuhan. Saat ini, Bappenas melalui BPS (Badan Pusat Statistik) sedang berupaya untuk menyempurnakan dan melengkapi data investasi dengan melakukan Survei Disagregasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto).

Institusi apa sebenarnya yang memiliki kontribusi luar biasa terhadap investasi, Pemerintah? Swasta? atau Rumah Tangga? Selanjutnya juga Asset apa saja yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas, Peralatan dan Mesin? Pembangunan Infrastruktur? Output *survey* yang tepat dapat dijadikan sebagai acuan yang luar biasa bagi pemerintah.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Sehingga pemerintah harus yakin bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.

[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2023/05/27/169884/waspada_jebakan_pertumbuhan_ekonomi/

BAB II

Pertanian



MENGUJI RESILIENSI PERTANIAN REGIONAL

Oleh : Ragdad Cani Miranti

Ringkasan

Pertanian masih menjadi sektor primadona yang mewarnai perekonomian masyarakat Sumatera Utara, terkhusus ekonomi regional. Saat pandemi, pertanian merupakan lapangan usaha yang tumbuh positif di saat sektor-sektor lainnya mengalami keterpurukan. Pertumbuhan pertanian yang konsisten berdampak signifikan pada berbagai lapisan, khususnya terhadap petani. Peningkatan Nilai Tukar Petani menjadi salah satu indikatornya. Secara nasional, pertanian yang resilien mendorong terwujudnya ketahanan pangan yang unggul dan tangguh.

Kata kunci: resiliensi, pertanian regional, struktur ekonomi, ketahanan pangan

Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2022. Angkanya sedikit dapat terprediksi. Pasalnya, pasca masa pemulihan, hampir semua wilayah berada di fase percepatan pertumbuhan. Hal ini dibuktikan dengan perekonomian Sumatera Utara yang tumbuh impresif mencapai 4,73 persen, naik sebesar 2,12 persen poin dibandingkan tahun 2021. Performa ini didorong oleh geliat aktivitas ekonomi di hampir semua sektor. Terlebih lagi, transformasi digital yang semakin memberikan ruang kepada pelaku ekonomi untuk berkreativitas dan mengoptimalkan usaha melalui pemanfaatan internet.

Pertanian Mewarnai Struktur Ekonomi

Di tengah tantangan akan pemenuhan pangan nasional, Indonesia memiliki nilai tambah yang menguatkan daya saing di kancah pertanian global. Pandemi telah berhasil menguji resiliensi pertanian untuk dapat bertahan di tengah kontraksi ekonomi regional. Sebagai kilas balik, tahun 2020 merupakan pukulan terkuat bagi ekonomi mancanegara. Akan tetapi, sektor pertanian dapat konsisten tumbuh positif sebesar 1,95 persen meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di saat kondisi sosial ekonomi semakin kondusif, pertanian semakin berkontribusi dalam memulihkan ekonomi Sumatera Utara. Tahun 2022, sektor pertanian menyumbang perekonomian Sumatera Utara sebesar 5,17 persen. Tentunya ini menjadi penguat variasi sumber-sumber pertumbuhan sehingga tidak hanya sektor sekunder dan tersier saja yang dapat memberikan

trigger ekonomi, namun sektor primer tak kalah mengakselerasi performa ekonomi regional Sumatera Utara.

BPS juga mencatat bahwa pertanian mendominasi struktur perekonomian Sumatera Utara. Dengan kontribusi sebesar 23,01 persen terhadap total output ekonomi tahun 2022, identitas Sumatera Utara masih belum bisa beralih sebagai lumbung padi dan perkebunan rakyat. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian memberikan andil yang besar dalam menyerap tenaga kerja setelah sektor jasa. Tercatat sebesar 35,62 persen pekerja di Sumatera Utara bergelut di sektor pertanian dan diprediksikan akan meningkat di tahun-tahun mendatang.

Pada saat pandemi, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja dalam volume yang besar. Sementara itu, sektor industri, pariwisata, dan jasa menerapkan rasionalisasi tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan angka pengangguran, terlebih pada kota-kota besar dengan sentra jasa dan perdagangan, seperti Kota Medan dan Pematangsiantar, yang menyentuh angka pengangguran dua digit. Berkaca pada resesi yang telah dua kali dilalui oleh Indonesia, terjadi *shifting* pada penyelamat ekonomi masa krisis 1997-1999 dan krisis selama pandemi. Pada krisis keuangan tahun 1997-1999, industri UMKM menjadi penopang ekonomi negara, sementara selama gejolak pandemi, pertanian menjadi sektor penyelamat ekonomi negara, terkhusus di Sumatera Utara.

Nilai Tukar Petani Meningkat

Dengan tingkat *survival* yang tinggi, pertanian mampu menjadi sektor yang resilien dan menjadi kebanggaan. Beberapa kawasan yang menjadi kantung-kantung penyumbang pertanian terbesar di Sumatera Utara mendapatkan keuntungan baik selama pandemi maupun pasca pandemi. Pasalnya, wilayah dengan sektor unggulan sekaligus berbasis pertanian mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Di samping itu, wilayah-wilayah ini juga menyalip pertumbuhan wilayah perkotaan yang menyandarkan ekonomi pada sektor riil dan jasa. Kabupaten Simalungun, Langkat, Asahan, dan Labuhanbatu merupakan beberapa contoh kawasan yang tertopang pertumbuhannya oleh pertanian. BPS juga mencatat pada tahun 2022, laju pertumbuhan pertanian di beberapa kabupaten potensial di Kawasan Pantai Timur, yakni Langkat, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan tumbuh di atas 5,17 persen, yakni rata-rata pertumbuhan pertanian di Sumatera Utara. Sementara itu, dua kabupaten di Kawasan Pantai Barat turut mengungguli laju pertanian yang progresif, yakni Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan.

Tentunya kondisi pertanian yang kini semakin bergairah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan di level petani. Hal ini terjelaskan oleh meningkatnya Nilai Tukar Petani selama 2 tahun terakhir. Meningkatnya Nilai Tukar Petani mengindikasikan peningkatan daya beli petani. Dengan

begitu, motivasi petani untuk terus berproduksi semakin besar. Besarnya nilai surplus NTP akan mendorong pada peningkatan produktivitas petani dan meningkatkan perekonomian perdesaan, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor terkait lainnya, serta membangkitkan gairah *demand and supply* produk-produk non pertanian.

Meningkatnya Nilai Tukar Petani secara tidak langsung berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan antar wilayah kota-desa serta optimalisasi sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam, manusia, maupun modal. Sinergitas antara pertumbuhan progresif yang ditunjukkan oleh sektor pertanian dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani tercermin dari data yang dirilis oleh BPS. Tren positif pertumbuhan sektor pertanian sejak masa pandemi turut menjaga kesejahteraan petani dengan capaian Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi pada April 2022 yakni sebesar 130,38 sedangkan NTP terendah selama periode 2020-2022 tercatat pada Mei 2020 sebesar 104,25. Meskipun demikian, terlihat dari data bahwa selama tahun 2020, nilai NTP konsisten berada di atas 100 yang melambangkan kondisi petani masih berada pada level surplus dan tidak tertekan oleh gejala kenaikan harga.

Mendorong Ketahanan Pangan

Pertanian telah terbukti resilien dalam mempertahankan anjaknya perekonomian regional Sumatera Utara. Namun, karena nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh sektor ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan nilai tambah sektor industri dan jasa, tak jarang isu pertanian dan ketahanan pangan masih menjadi problematika tahunan. Apalagi, metode pertanian yang diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia masih didominasi oleh pertanian konvensional. Tantangan yang dihadapi tentunya tak jauh dari optimalisasi produksi pertanian, terutama tanaman pangan dan hortikultura. Sebagai negara yang berdaya, pemenuhan akan kebutuhan komoditas pangan dan hortikultura seharusnya bersumber dari swasembada pangan. Sebagaimana Undang-Undang No.18/2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Merujuk Undang-Undang tersebut, tentunya kuantitas nilai tambah bukan lagi menjadi persoalan, namun kualitas dan keberlanjutan yang utama. Menjaga rantai pasok komoditas pangan, utamanya padi-padian agar tetap dapat menjaga status kemandirian pangan secara kontinyu. Hasil KSA Padi tahun 2022 oleh Berita Resmi Statistik yang dirilis BPS merangkum bahwa secara agregat, produksi padi di Sumatera Utara mengalami surplus atau meningkat sebesar 6,46 persen dibandingkan kondisi tahun 2021. Hal ini juga sejalan dengan rata-rata peningkatan luas

panen di Sumatera Utara. Fakta empiris ini menjadi bukti dukung sekaligus landasan bahwa ketahanan pertanian regional di Sumatera Utara telah teruji untuk membangkitkan ekonomi kembali. Semoga peran dan kebermanfaatan pertanian dapat mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di Sumatera Utara.

[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

<https://analisadaily.com/e-paper/2023-02-15/files/assets/basic-html/page12.html>

<https://sumut.bps.go.id>

ADA APA DENGAN BERAS?

Oleh : Aan Willyana

Ringkasan

Permasalahan terkait kecukupan kebutuhan pangan senantiasa muncul, utamanya kebutuhan akan komoditas beras. Tulisan ini mengulas tentang problematika beras dan ketahanan pangan, serta ide dasar untuk memulai diversifikasi pangan kembali.

Kata kunci: *beras, ketahanan pangan, pertanian*

Pangan merupakan kebutuhan vital bagi kelangsungan hidup manusia. Bahan pangan pokok bagi penduduk Indonesia adalah beras. Belum makan rasanya jika belum mengonsumsi nasi. Kondisi tersebut mengharuskan negara kita wajib memperhatikan kecukupan ketersediaan beras setiap waktu, sehingga beras memiliki nilai strategis dalam perekonomian nasional.

Selain itu, beras juga menjadi komoditas strategis yang memengaruhi kehidupan sosial politik negara karena sistem agribisnis beras yang memiliki *multiplier effect*. Proses bisnis yang terjadi dalam penyiapan komoditi beras melibatkan jutaan angkatan kerja dan bahkan keterkaitan rantai bisnis dengan berbagai aktivitas sosial-ekonomi lainnya.

Lapangan Usaha Pertanian merupakan penyumbang terbesar ketiga pilar perekonomian Indonesia, dengan peran 13,35 persen bagi PDB (Produk Domestik Bruto) pada triwulan II lalu. Sektor ini juga melibatkan 88,89 persen dari tenaga kerja informal. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, penyerapan tenaga kerja per Februari 2022 mengalami kenaikan hingga 4,55 juta orang, dimana sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian.

Ketahanan pangan yang berdaulat

Ketahanan pangan merupakan salah satu kewajiban negara untuk menjamin kestabilan nasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Berbagai program yang inklusif, *resilient*, dan berkelanjutan perlu diterapkan dalam pilar-pilar ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan harus lebih bersifat multisektor dari aspek hulu hingga hilir dengan berbasis pada semangat kemandirian yang berdaulat.

Menurut laporan FAO, ketahanan pangan memiliki empat dimensi, yakni ketersediaan yang cukup (*availability*), akses terhadap pangan (*access*), pemanfaatan pangan yang tepat (*utilization*),

serta stabilitas stok dan harga pangan (*stability*). Penilaian global terhadap keadaan pangan dan gizi pada tahun 2022 merupakan gambaran dari hal tersebut. Masih menurut laporan FAO pada 2022, dunia masih dalam tahap pemulihan dari pandemi global dan sekarang bergulat dengan konsekuensinya perang di Ukraina, yang telah mengguncang pangan dan pasar energi.

Kelaparan global yang diukur dengan salah satu indikator *SDGs*, yaitu prevalensi kekurangan gizi, ternyata kondisinya masih jauh di atas situasi pada saat sebelum pandemi. Proporsi populasi dunia yang menghadapi kelaparan kronis pada 2022 sekitar 9,2 persen, lebih tinggi dibandingkan 7,9 persen pada 2019. Setelah meningkat tajam pada 2020 diakibatkan pandemi global, situasi kerawanan pangan terus meningkat perlahan pada 2021 menjadi 9,3 persen.

Permasalahan ketahanan pangan menjadi isu strategis sampai saat ini. Bukan hanya ketersediaan pangan, namun juga kestabilan harga di tengah masyarakat. Harga beras yang terus meningkat beberapa waktu terakhir, menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah. Kondisi ini layak diwaspadai mengingat beras merupakan konsumsi utama masyarakat Indonesia, karena dikhawatirkan akan mengguncang inflasi dan faktor ikutan lainnya.

Fluktuasi harga beras

Berbicara tentang ketidakstabilan harga beras, secara umum dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti produksi beras yang berfluktuasi mengikuti musim tanam, sementara konsumsi beras stabil cenderung meningkat seiring waktu. Di sisi lain, saat harga beras rendah maka akan menurunkan tingkat kesejahteraan petani. Sebaliknya, bila harga beras tinggi mulai timbul kekhawatiran timbulnya rawan pangan terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Disinilah dirasa perlunya kehadiran pemerintah untuk dapat menjaga kestabilan harga beras, dengan berbagai cara seperti membeli gabah dari petani saat panen raya dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) guna melindungi petani dari rendahnya harga beli yang ditawarkan oleh pihak penggilingan, serta pada saat paceklik, dengan mengadakan operasi pasar dan mengeluarkan cadangan beras dari gudang dan dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan guna melindungi konsumen dari mahalnya harga beras yang terjadi akibat kelangkaan beras di pasar.

Persebaran sentra produksi beras yang tidak merata juga menjadi penyebab kekurangan pangan. Setiap wilayah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan perdagangan antar wilayah. Pada akhirnya, aktivitas perdagangan tersebut akan membentuk rantai distribusi sejak dari produsen hingga konsumen akhir. Panjangnya aliran distribusi tersebut akan membuat margin harga produsen dan konsumen semakin tinggi. Hal tersebut akan merugikan banyak pihak, produsen mendapatkan harga yang lebih murah sedangkan konsumen akan membayarkan harga yang lebih mahal dari seharusnya.

Diversifikasi pangan

Peran beras sebagai makanan pokok di Indonesia sangat sulit disubstitusikan dengan jenis makanan pokok yang lain. Ketergantungan terhadap komoditi beras justru semakin meningkat. Daerah wilayah timur Indonesia yang dahulu menjadikan makanan pokok non-beras seperti jagung dan sagu seiring berjalannya waktu justru beralih mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Akibatnya, rasio konsumsi beras menjadi bertambah dan terus mengalami peningkatan sehingga konsumsi beras Indonesia adalah konsumsi terbesar di dunia.

Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan serta peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, telah mengamanatkan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada konsumsi beras dan terigu. Kementerian Pertanian menempatkan program diversifikasi pangan lokal sebagai cara bertindak kedua (CB2) dalam program peningkatan ketersediaan pangan di era normal baru. Berdasarkan laporan Badan Ketahanan Pangan, program ini difokuskan pada peningkatan penyediaan dan konsumsi jagung, ubi kayu, sagu, kentang, pisang dan talas untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Jadi, kenapa kita tidak mulai mencoba untuk mengurangi ketergantungan akan beras?

[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

<https://epaper.waspada.id/epaper/waspada-selasa-26-september-2023/>

BAB III

UMKM



SINERGI MENUJU SATU DATA UMKM

Oleh : Ragdad Cani Miranti

Ringkasan

UMKM telah terbukti berhasil menjadi katrol perekonomian masyarakat menengah ke bawah selama dan setelah pandemi. Saat ini, kinerja UMKM menjadi salah satu fokus pembangunan dan kebijakan regional. Data yang terintegrasi antar lembaga/instansi dipandang perlu untuk mendukung UMKM berkelanjutan. Sinergitas menuju satu data UMKM sudah saatnya menjadi aksi nyata. Tidak hanya itu, pembinaan sektoral terhadap pelaku usaha UMKM serta pengambil kebijakan di lingkup pemerintah nasional maupun daerah tak kalah penting dalam menjaga stabilitas performa UMKM di Indonesia.

Kata kunci:UMKM, satu data, sinergitas, pembinaan sektoral

Saatnya usaha kecil berjaya. Begitulah potret geliat usaha kecil saat ini. Kini, peningkatan kesejahteraan dapat dicapai dengan berbagai langkah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satunya. UMKM dipandang sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Selain meningkatkan performa perekonomian serta menjadi motor penggerak ekonomi khususnya masyarakat menengah ke bawah, dampak ikutan yang diberikan oleh UMKM cukup signifikan dalam mendongkrak potret ketenagakerjaan di Indonesia. Di samping itu, melalui penetrasi UMKM yang telah menyebar luas, penguatan iklim investasi juga mulai terlihat. Kontribusi UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Selama pandemi, Indonesia mengalami kelesuan ekonomi. Kondisi perekonomian yang lumpuh dengan ragam ketidakpastian menghantarkan pada khasanah baru akan pentingnya berpikir kreatif. Tidak hanya itu, usaha industri kecil dan menengah telah bersiap dalam merespons transformasi digital yang kian meluas di era pandemi. Di masa pandemi, masyarakat mengalami perubahan perilaku serta orientasi dalam hal berbelanja, seperti berbelanja online menggunakan platform *e-commerce*. Fenomena ini telah menjadi suatu kebiasaan baru yang terbawa hingga saat ini.

Dengan demikian, UMKM memiliki potensi untuk tumbuh mencuat seiring dengannya lonjakan aktivitas pada e-commerce yang dilakukan oleh masyarakat.

Prospek kuat UMKM semakin terlihat sejak munculnya istilah UMKM digital yang diusung oleh pemerintah selama 2 tahun terakhir. UMKM digital merupakan suatu wahana baru yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produk serta menjualnya pada platform online. Dengan UMKM digital, efektivitas biaya dan waktu dapat tercapai serta memberikan produktivitas yang lebih terukur. Di Kota Medan, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan telah mencatat sebanyak 210 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Medan telah memasarkan produk secara daring. Selain itu, pelatihan dan pembekalan terhadap konsep UMKM digital juga telah diterapkan secara masif dengan melibatkan beberapa stakeholders terkait.

Pentingnya Satu Data UMKM

Telah diketahui bersama bahwa UMKM mendominasi perekonomian sejak beberapa tahun terakhir. Kemenkop UMKM melaporkan bahwa UMKM berkontribusi sebesar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto dan mampu menciptakan kesempatan kerja sebesar 116.978.631 orang atau 97% dari total tenaga kerja nasional. Atas dasar capaian tersebut, pembangunan kewirausahaan UMKM menjadi salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Harapannya, UMKM mampu meningkatkan kontribusinya terhadap nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Data UMKM yang berkualitas sangat dibutuhkan guna mewujudkan keberlangsungan UMKM yang inklusif. Pemerintah berupaya membangun sistem data tunggal yang mengelaborasi data UMKM baik di level nasional maupun daerah. Sistem data tunggal UMKM merupakan pengejawantahan dari tindak lanjut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur kemudahan usaha bagi UMKM melalui pengembangan basis data tunggal. Basis data tunggal ini diharapkan mampu mengevaluasi tata kelola UMKM di seluruh Indonesia. Di samping itu, penerapan digitalisasi UMKM akan mudah terpantau dengan adanya sistem data tunggal UMKM. Sebagai dampak akhir, taraf hidup pelaku usaha juga mengalami peningkatan.

Tantangan yang dihadapi

Dalam mewujudkan tujuan baik menuju kesinambungan satu data UMKM, tentunya beberapa hal menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya terkait ketersediaan data UMKM yang terbaru dan terintegrasi. Ketersediaan data terkait karakteristik, pelaku, dan output UMKM menjadi penting dalam memberikan intervensi program agar dapat lebih tepat sasaran. Untuk

meningkatkan kapasitas usaha serta mengembangkan potensi UMKM, intervensi seharusnya tak hanya menjadi teori saja. Ketepatan langkah strategis dalam mewujudkan realisasi satu data UMKM harus menjadi perhatian bersama. Dinamisnya data UMKM terlebih di era digital yang mengusung digitalisasi membantu pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan UMKM.

Tidak hanya dari sudut pandang ketersediaan data, konsistensi data juga menjadi momok yang mengganjal hingga saat ini. Data yang konsisten akan memotret keadaan UMKM yang sebenarnya, bukan hasil rekayasa maupun pencitraan. Data yang konsisten juga harus dibarengi dengan keterbaruan data. Kombinasi dua kondisi ini akan mengusung cerminan basis data UMKM yang siap pakai dan siap diimplementasikan. Proses dan prosedur penyusunan basis data juga memiliki dinamika tersendiri. Aturan main seperti berbagi pakai data, dukungan regulasi, konsekuensi, dan pelanggaran terhadap perlindungan data masih belum dipedomani dengan patuh. Terkait perancangan dan teknologi, ketersediaan panduan/buku manual untuk menjalankan proses dan aturan tersebut harus diperhatikan secara bijak.

Di sisi lain, literasi dan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi hal yang tak kalah penting untuk mewujudkan satu data UMKM. Masalah yang dihadapi masih berputar pada kapasitas dan penguasaan teknologi informasi. Kesulitan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah mencari orang dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Keterampilan dari sisi teknologi informasi sangat diperlukan mengingat proses pengelolaan data di tingkat nasional juga membutuhkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

Sinergi dan Pembinaan Sektoral

Peranan usaha kecil mampu menyerap lebih dari 90 persen angkatan kerja dan menyumbang lebih dari 50 persen terhadap total PDB. Untuk mengakselerasi *value-added* yang telah terbentuk, dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Partnership (kemitraan) antara pemerintah dan sektor swasta merupakan salah satu kunci keberhasilan UMKM tanah air. Dukungan yang kolaboratif oleh pihak internal maupun eksternal sangat dibutuhkan. Asistensi berupa pelatihan, pembinaan statistik sektoral, kepercayaan, maupun pembiayaan bagi pegiat UMKM yang baru merintis maupun yang telah *sustained* sepatutnya diwujudkan secara kesinambungan. Upaya dukungan yang lain adalah dengan sinergitas antar instansi/lembaga dengan pihak industri untuk merealisasikan digitalisasi UMKM demi menyongsong UMKM yang berorientasi ekspor dan berdaya saing internasional.

Di bawah Komando Kemenkop, sinergitas antar lembaga telah tercermin dengan terbitnya penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam PP tersebut, penyusunan

basis data tunggal UMKM menggunakan sistem informasi data tunggal UMKM merupakan satu poin penting untuk diimplementasikan. Penyusunan peta jalan menuju Pengembangan Basis Data UMKM Terpadu telah digagas. Peta jalan ini dirancang untuk membantu proses koordinasi dan kolaborasi dalam mengumpulkan, membuat kerangka acuan, dan mendiseminasikan data, terutama terkait integrasi dan interoperabilitas data dari berbagai sumber. Harapannya, tujuan mulia kita bersama dalam membangun citra UMKM yang lebih baik di masa depan, yaitu *“Toward a World-Class MSME Development”* dapat tercapai. Semoga. Amin.

[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

<https://analisdaily.com/e-paper/2023-09-21-5Op-4MLZ3K/files/mobile/index.html#11>

<https://sumut.bps.go.id>

MENYOAL DATA UMKM

Oleh : Aan Willyana

Ringkasan

Artikel ini berbicara tentang peran besar UMKM di Indonesia. Dalam tulisan ini juga diceritakan terkait pendataan UMKM yang sedang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik serta harapan bahwa hasil pendataan tersebut akan mampu menjawab persoalan terkait UMKM.

Kata kunci: *pendataan UMKM*

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sudah selayaknya memperolah kesempatan luas dalam bereksplorasi dan berekspresi. UMKM merupakan salah satu kegiatan usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja secara masif dan memberikan pelayanan ekonomi secara langsung pada masyarakat. Dukungan, perlindungan dan upaya pengembangan yang maksimal harus diberikan sebagai wujud nyata keberpihakan pada kelompok usaha ekonomi rakyat, tentu saja tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

UMKM juga memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, meskipun potensi dalam hal besaran produktivitas cenderung lebih rendah. Struktur organisasi dan tenaga kerja yang lebih fleksibel disinyalir menjadi salah satu kekuatan bagi pelaku UMKM dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Daya tahan dan fleksibilitas ini juga yang menjadikan UMKM biasanya digunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber utama penghasilan. Namun, perputaran roda bisnis UMKM juga tak luput dari berbagai kendala dan hambatan.

Sebagai contoh, pada masa pandemi covid-19 yang telah mengakibatkan terjadinya pelambatan sektor ekonomi serta berbagai turunannya. UMKM dihadapkan dengan banyak kendala seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi, kesulitan bahan baku, produksi yang menurun hingga mengakibatkan berdampak pada pemutusan hubungan kerja untuk pekerja dan buruh. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja akan menghadapi penurunan produktivitas yang berkelanjutan yang dapat berakibat pada penurunan profit secara signifikan.

Eksistensi UMKM saat ini juga dirasa cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, jumlah industri yang sangat banyak dan terdapat hampir dalam setiap sektor ekonomi; berpotensi besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan/restoran. Sedangkan pada usaha menengah, memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan.

Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2021 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dimana jika dikorelasikan dengan data BPS, maka kontribusinya terhadap PDB mencapai sebesar 61,07% atau setara dengan 8.573,89 triliun rupiah. Di sisi lain, kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja tercatat hampir 97 persen dengan kapasitas menjangkau investasi hingga lebih dari 60 persen. Hal ini menjadi salah satu bukti dukung bahwa UMKM merupakan tulang punggung di segala sektor untuk pembangunan ekonomi nasional.

Dilihat dari sebarannya, penetrasi lahirnya UMKM juga merata untuk setiap Pulau yang ada di Indonesia. Di luar Pulau Jawa, Sumatera merupakan pulau dengan jumlah UMKM terbanyak. Sumatera Utara bahkan menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan UMKM yang terus meningkat pada setiap tahunnya.

Pengembangan UMKM dalam meningkatkan produktivitas harus lebih mendapat perhatian, bukan hanya dalam hal penambahan populasi, namun juga kompetensi dan daya saing, terlebih dengan kemajuan teknologi terkini. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, kehadiran pemerintah juga harus dirasakan oleh para pengusaha UMKM ini.

Data merupakan langkah awal dalam penentu segala kebijakan. Dalam hal ini, basis data tunggal merupakan bagian penting proses pemberdayaan UMKM. Data tersebut dapat digunakan sebagai identifikasi awal untuk mengetahui lebih mendalam profil para pelaku usaha serta informasi terkait karakteristik usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sedang melaksanakan pendataan UMKM dengan menysasar di 215 wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia (kecuali Provinsi DIY dan Bali) untuk mendata usaha nonpertanian, baik yang menetap atau tidak menetap. Pada 2022 lalu, KemenKopUKM sebelumnya telah melaksanakan pendataan dengan hasil didapatkan sembilan juta data UMKM *by name by address*. Pendataan ini bersifat melakukan proses *updating* sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang tunggal dan terpercaya sebagai dasar kebijakan selanjutnya. Ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM yang mutakhir ini diharapkan dapat dikelola secara berkelanjutan

sebagai *single source of truth* yang nantinya akan sangat vital bagi pemerintah dan pengguna data lainnya.

Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 telah dimulai sejak 15 September lalu dan akan berlangsung hingga 14 Oktober 2023 untuk pengumpulan datanya, di mana data dikumpulkan dengan metode *door-to-door* dengan moda pendataan CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) oleh petugas BPS. Selain menanyakan kuesioner, petugas akan melakukan *geotag* dan mengambil foto khusus bangunan koperasi dan UMKM.

Informasi yang dikumpulkan pada pendataan ini antara lain terkait dengan informasi unit usaha/perusahaan yang mencakup nama usaha dan alamat, informasi pelaku usaha, hingga informasi karakteristik usaha. Pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan output basis data tunggal koperasi dan UMKM *by name by address* berdasarkan demografi dan karakteristik usaha.

Keberhasilan dalam pendataan UMKM ini akan menjadi jawaban atas beberapa persoalan terkait UMKM yang tengah ditangani Pemerintah. *Pertama*, sehubungan dengan amanat UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dimana pada beberapa waktu lalu Presiden telah menyetujui upaya penghapusan tagihan kredit macet bagi UMKM agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi. Data ini diharapkan dapat menjadi data dasar untuk menetapkan penerima manfaat program-program nasional dengan lebih tepat sasaran.

Kedua, dengan adanya gambaran yang tepat serta pemahaman yang lebih baik tentang UMKM dan karakteristiknya, pemerintah juga dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Kebijakan diambil berdasarkan kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM sehingga dapat lebih berdampak secara optimal. *Ketiga*, kehadiran data tunggal merupakan komponen penting dalam setiap perencanaan pembangunan. Data yang bersifat menyeluruh mampu memberikan gambaran lengkap terkait *issue* yang terjadi sehingga pemerintah tidak salah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung UMKM.

Keempat, basis data tunggal juga menjadi salah satu sarana untuk mengukur evaluasi kinerja program pemerintah. Tingkat efektivitas dari sebuah program pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan dapat lebih terukur sehingga monitoring dan evaluasi terhadap program tersebut dapat focus pada pencapaian tujuan. *Kelima*, data lengkap yang dihasilkan dari pendataan ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar kajian dan analisis perkembangan dan kemajuan UMKM itu sendiri.

Suksesnya pendataan UMKM merupakan kontribusi nyata kita untuk kemajuan Indonesia..!

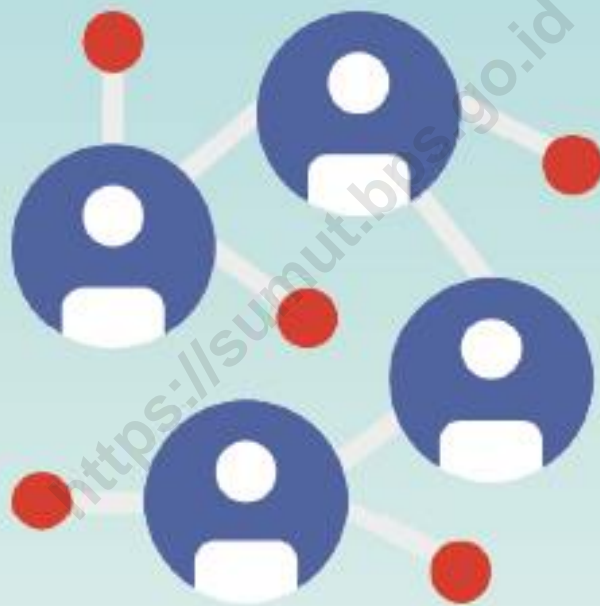
[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

[Harian Analisa, 21 September 2023 \(nalisadaily.com\)](https://www.analisadaily.com)

<https://sumut.bps.go.id>

BAB IV

Sosial



GURU BERKUALITAS UNTUK PENDIDIKAN BERKUALITAS

Oleh : Marlina Naibaho

Bulan November terasa lebih istimewa bagi masyarakat yang berprofesi sebagai seorang guru. Keputusan Presiden No 78 Tahun 1994 menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional, sebagai salah bentuk penghargaan terhadap jasa guru dalam mendidik dan membentuk generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.

LTMPPT merilis Sekolah Menengah Atas yang masuk dalam Top 1000 berdasarkan nilai UTBK tahun 2022 yang berasal dari 23.657 sekolah se-Indonesia. Kota Pematangsiantar boleh berbangga hati, ada tiga SMA yang masuk dalam Top 1000 dari sebelumnya dua sekolah. SMA Swasta Budi Mulia, SMA Negeri 4 dan SMA Swasta Kalam Kudus mampu menjadi tiga sekolah masuk dalam Top 1000. (<http://ltmpt.ac.id>). Raihan prestasi ini tidak terlepas dari peran para guru yang tiada lelah mendidik dan memotivasi para siswa/i untuk berprestasi. Prestasi ini harus menjadi cambuk bagi guru dalam memotivasi anak didik untuk terus meraih pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berprestasi. Hal ini menjadi penting dalam mengurangi siswa/i yang berhenti sekolah pada usia sekolah karena kurangnya motivasi.

Data BPS menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2023 cenderung semakin kecil untuk kelompok usia jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perlu menjadi perhatian bahwa masih cukup besar proporsi anak sekolah yang seharusnya masih bersekolah pada usia 16-18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) juga menunjukkan pola data yang sama. Bahkan, APM SMA masih sangat kecil dibawah 80 persen. Perhatian besar pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pematang Siantar.

Nilai APS dan APM Tahun 2023

APS		APM	
Kelompok Umur	Nilai (%)	Jenjang Pendidikan	Nilai (%)
7-12 tahun	99,07	SD	99,07
13-15 tahun	99,75	SMP	83,74
16-18 tahun	86,59	SMA	70,88

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya dicapai dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang baik dan memadai saja, tapi harus disertai dengan peningkatan kualitas tenaga pendidiknya. Pelatihan yang berkesinambungan bagi tenaga pendidik sangat dibutuhkan agar kualitas tenaga pendidik semakin baik dan berkembang. Namun, pelatihan tidak hanya berkaitan dengan hardskill saja, tapi harus diikuti dengan softskill. Kombinasi hardskill dan softskill akan mendukung metode pembelajaran

yang lebih menarik dan interaktif. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi anak didik sehingga motivasi untuk bersekolah semakin tinggi.

Tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan ada sebanyak 4.305 orang tenaga pendidik yang tersebar di 92 sekolah negeri dan 127 sekolah swasta dari jenjang pendidikan SD hingga SMA/K (<https://dapo.kemdikbud.bps.go.id>). Keterbatasan anggaran pemerintah daerah akan menjadi kendala yang berarti untuk menjangkau semua tenaga pendidik. Pemerintah daerah perlu menggandeng pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Akan sangat berarti bila pihak swasta bisa mengadakan pelatihan bagi tenaga pendidik melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dimiliki. Selain itu, kesadaran tenaga pendidik itu sendiri untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi secara mandiri harus ada. Seiring dengan kemajuan teknologi, akses materi-materi pelatihan untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik sangat mudah dan tersedia cukup banyak. Pemerintah daerah perlu mendorong para tenaga pendidik untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Guru yang berkualitas akan menghasilkan anak didik yang berkualitas juga.

[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

<https://www.hetanews.com/article/277741/guru-berkualitas-untuk-pendidikan-berkualitas>

TREN DIGITALISASI DI INDONESIA

Oleh : ERFIN TRIYAMAN HAREFA, SST

Ringkasan

Perkembangan teknologi digital memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat modern termasuk penggunaannya dalam dunia kerja. Pandemi telah mendorong percepatan pemanfaatan teknologi digital, mengubah cara seseorang dalam berbisnis dan bekerja melalui sebuah jejaring tanpa batasan ruang dan waktu. Catatan dan tren ini tergambar pada data-data BPS yang saling berhubungan. Sebut saja, berdasarkan data Statistik E-commerce 2022 memotret banyaknya usaha yang melakukan kegiatan e-commerce di Indonesia persentasenya sebesar 15,08 persen pada tahun 2019 naik menjadi 34,10 persen.

Kata kunci: *internet, digitalisasi, data BPS, e-commerce, teknologi informasi dan komunikasi*

[TEKS ARTIKEL]

“Bang, pesannya sudah sesuai?” atau “pesanan Anda sedang dalam proses pengiriman menuju alamat Anda” adalah pesan instan yang muncul dari aplikasi pesan antar makanan ataupun dari aplikasi *tracking* perjalanan barang yang sudah di pesan lewat aplikasi. Munculnya berbagai macam aplikasi yang mempermudah pekerjaan atau kegiatan masyarakat di masa kini membuat jarak semakin dekat dan waktu semakin cepat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini menandai proses digitalisasi yang semakin pesat di kalangan masyarakat, berdampak pada perubahan gaya hidup termasuk di dalamnya pola konsumsi masyarakat yang semakin memperhatikan porsi anggaran pengeluaran konsumsi masyarakat pada TIK ini. Sudah hampir 100 persen atau lebih tepatnya sudah 91,06 persen rumah tangga yang memiliki anggaran pengeluaran konsumsi TIK setiap tahunnya (BPS, Statistik Telekomunikasi 2021). Besaran rupiah pengeluarannya setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan terhadap TIK seperti pembelian handphone, komputer, service peralatan telekomunikasi, langganan internet, dan konsumsi TIK lainnya yang sudah hampir sama dengan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap bulan hingga tahunan.

Perkembangan telekomunikasi tumbuh pesat di Indonesia dari tahun ke tahun, hal ini tercermin dari tingginya laju pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi. Sektor informasi dan komunikasi tercatat sebagai sektor dengan laju pertumbuhan PDB tertinggi kedua setelah sektor jasa.

Era digital masa kini, internet semakin berkembang dan banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semakin berkembang pula ketersediaan infrastruktur serta kecepatan akses terhadap internet.

Manfaat digitalisasi ini seharusnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan. Sayangnya perkembangan TIK ini lebih dirasakan oleh individu/masyarakat yang tinggal di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Hal ini ditunjukkan oleh data BPS, ketimpangan penetrasi internet yang terjadi antar wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan proporsi penduduk perkotaan yang mengakses internet sebesar 71,8 persen lebih besar daripada penduduk pedesaan sebesar 49,3 persen (BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022). Tantangan berikutnya menyediakan infrastruktur TIK yang memadai di lokasi pedesaan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari proses digitalisasi tersebut. Seharusnya di pedesaan, TIK juga semakin berkembang dan dirasakan manfaatnya, contohnya saja dapat memperpendek jarak yang jauh di tempuh oleh masyarakat ketika mengurus keperluan administrasi kependudukan, masyarakat di pedesaan dapat dengan mudah mengurus hari ini melalui aplikasi dan mengambil keperluannya tersebut di hari yang tertera pada aplikasi, masyarakat mampu menghemat waktu dan pelayanan publik dapat tertuju pada output yang jelas.

Di masa kini, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli barang dan/atau jasa melalui internet. Sebut saja makanan dan minuman, fashion, kebutuhan rumah tangga, kosmetik, jasa transportasi, hiburan, handphone hingga jasa pendidikan pun tersedia secara online. Sebelum teknologi canggih masa kini, keluar rumah adalah sebuah keharusan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan, hingga bermunculan fenomena e-commerce. Fenomena e-commerce menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko. Usaha e-commerce merupakan usaha yang menggunakan internet untuk penjualan barang dan/atau jasa dan terdapat transaksi penjualan melalui internet. Banyaknya usaha yang melakukan kegiatan e-commerce di Indonesia persentasenya sebesar 15,08 persen pada tahun 2019 naik menjadi 34,10 persen per tanggal 15 September 2022 lalu (BPS, Statistik E-commerce 2022).

Dua kali lipat bertambahnya usaha e-commerce tersebut tidak membuat usaha industri mikro kecil ikut juga bertumbuh dalam euforia perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masa kini. Data menunjukkan bahwa persentase usaha industri mikro kecil (IMK) yang menggunakan internet hanya 16,39 persen (BPS, Profil Industri Mikro Kecil 2020), bahkan tidak mencapai setengahnya jumlah usaha IMK di Indonesia, padahal IMK adalah salah satu pelaku ekonomi yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia, yang menjadikannya sebagai penyangga perekonomian dalam mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Salah satu penyebab rendahnya penggunaan internet pada usaha IMK adalah rendahnya tingkat pendidikan pengusaha IMK dan belum melek teknologi. Edukasi dan kecakapan penggunaan TIK ini menjadi tantangan berikutnya dalam proses digitalisasi di kalangan pelaku usaha IMK, sehingga menciptakan progress yang lebih masif bagi para pelaku usaha IMK dalam mempromosikan produk mereka di platform digital.

Pandemi telah mendorong percepatan pemanfaatan teknologi digital, mengubah cara seseorang dalam berbisnis dan bekerja melalui sebuah jejaring tanpa batasan ruang dan waktu. Pada masa pandemi juga, telah terjadi peningkatan penggunaan teknologi digital yang didorong oleh adanya perubahan perilaku masyarakat dalam bekerja, belajar, bertransaksi dan konsumsi. Perkembangan digitalisasi seiring dengan Revolusi Industri 4.0 telah mendorong terbentuknya individu/masyarakat digital, ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, salah satunya penggunaan internet.

Perkembangan teknologi digital memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat modern termasuk penggunaannya dalam dunia kerja.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir dalam kegiatan bekerja tahun 2012 sebesar 47,84 persen dan tahun 2021 sebesar 62,58 persen (naik sebesar 14,74 persen).

Adanya penggunaan teknologi selain memudahkan seseorang dalam melakukan pekerjaan juga mendorong peningkatan produktivitas. Penggunaan teknologi digital mendorong pertumbuhan pendapatan tenaga kerja seiring dengan meningkatnya keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Tenaga kerja dengan pendidikan perguruan tinggi dan menggunakan teknologi digital memiliki rata-rata pendapatan terbesar yaitu Rp 4,115 juta per bulannya sedangkan untuk yang tidak menggunakan teknologi digital hanya sebesar Rp 2,601 juta per bulan.

Semakin berkembangnya TIK di Indonesia menjadi tanda proses digitalisasi yang semakin berkembang juga. Banyak tantangan yang dihadapi ke depan, dengan begitu, proses digitalisasi ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dapat memberikan efek positif yang mendukung Indonesia beradaptasi menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.

[BUKTI TAYANG ARTIKEL]

Tayang di Harian Analisa secara epaper dan koran tanggal 1 Februari 2023:



PENUAAN PENDUDUK DAN POTRET LANSIA INDONESIA

Oleh : Dwina Wardhani Nasution

Ringkasan

Periode Indonesia Emas tahun 2045, populasi lansia diproyeksikan mencapai 20 persen dari total penduduk. Penuaan penduduk berimplikasi terhadap bidang ekonomi, sosial, politik, dan aspek kehidupan lainnya. Melonjaknya penduduk lansia di masa mendatang merupakan suatu keniscayaan ketika saat ini jumlah penduduk usia produktif melimpah. Kita semua berperan mempersiapkan lansia berkualitas demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kata kunci: *penduduk, ageing population, lansia*

Berapakah usia anda tahun 2045 mendatang? Apakah 60 tahun ke atas? Jika ya, maka pada tahun tersebut anda akan tergolong menjadi penduduk lanjut usia atau lansia. Pada periode Indonesia Emas tahun 2045, populasi lansia diproyeksikan mencapai 20 persen dari total penduduk. Artinya, satu dari lima penduduk adalah lansia.

Penuaan penduduk atau *Ageing Population* menjadi isu global yang krusial. Semua negara mengalami fase demografi ini namun dalam waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan laporan World Population Ageing 2015, negara-negara maju telah lebih dahulu mengalami penuaan penduduk meskipun memakan waktu lebih lama. Sementara di negara-negara berkembang seperti Amerika Selatan, Afrika dan Asia, penduduk lansia meningkat dalam waktu yang lebih cepat.

Indonesia sendiri sudah memasuki era penuaan penduduk sejak tahun 2021. Hal ini ditandai dengan struktur penduduk lansia sudah mencapai lebih dari 10 persen dari total penduduk. Persentase lansia meningkat setidaknya 3 persen selama satu dekade (2010-2021). Penuaan penduduk berimplikasi serius terhadap bidang ekonomi, sosial, politik, dan aspek kehidupan lainnya.

Tantangan atau Potensi Pembangunan?

Penuaan penduduk merupakan buah dari keberhasilan pembangunan. Khususnya dari pembangunan kesehatan yang mampu meningkatkan harapan hidup serta menurunkan angka fertilitas. Penduduk lansia pun meningkat, baik secara jumlah maupun proporsinya, sehingga mengubah komposisi umur penduduk suatu wilayah.

Berbicara perihal lansia, yang terbayang adalah suatu ketidakberdayaan dan kebergantungan pada orang lain. Lansia berpotensi menghadapi berbagai risiko seperti persoalan kesehatan fisik

maupun mental, penurunan produktivitas, masalah kemandirian finansial, partisipasi sosial hingga kebutuhan akan pendampingan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Umur Harapan Hidup (UHH) Indonesia adalah 71,85 tahun. Artinya setiap penduduk yang lahir di tahun tersebut diharapkan dapat hidup hingga 71,85 tahun. Kondisi ini meningkat dari tahun 2010 (69,81 tahun).

Indikator lain yang juga menunjukkan peningkatan yakni HALE (Healthy Life Expectancy at birth) atau umur harapan hidup sehat. Menurut Global Burden of Disease, HALE menunjukkan jumlah tahun yang dapat diharapkan seseorang pada usia tertentu untuk hidup dalam kesehatan yang baik, dengan mempertimbangkan kematian dan disabilitas.

Meskipun tren UHH dan HALE meningkat, namun gap tahun di antara kedua indikator ini masih tinggi dan cenderung tidak ada perubahan. Umur harapan hidup sehat (HALE) Indonesia tahun 2019 adalah sebesar 62,8 tahun dengan UHH sebesar 71,34 tahun. Ada gap 8 tahun antara UHH dan HALE penduduk saat lahir. Maknanya, lansia Indonesia akan menghabiskan 8 tahun usia hidupnya dalam kondisi sakit atau disabilitas.

Penuaan penduduk dapat meningkatkan beban ketergantungan lansia. Nilai rasio ketergantungan lansia meningkat dari 11,95 persen pada 2010 menjadi 16,09 pada tahun 2022. Artinya, setiap 1 orang lansia didukung oleh sekitar 6 orang penduduk usia produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan lansia dapat menurunkan nilai tabungan. Angkatan kerja kemudian menyusut sehingga rasio modal menjadi tenaga kerja naik dan investasi juga dapat menurun.

Kendati beban ketergantungan lansia meningkat, tahun 2022 sebesar 52,55 persen lansia masih bekerja. Suatu hal yang positif, 1 dari 2 lansia kita masih produktif. Setidaknya untuk menghidupi diri sendiri. Namun masih banyak lansia yang terpaksa bekerja karena menjadi tulang punggung keluarga, terutama sebagai kepala rumah tangga. Lebih dari separuh lansia berperan sebagai kepala rumah tangga (56,73 persen).

Selain itu, kebanyakan lansia bekerja di sektor pertanian dan berstatus pekerja informal. Pekerjaannya pun adalah pekerjaan rentan (jangka pendek dan tidak tercakup dalam perlindungan ketenagakerjaan) karena rata-rata pendidikannya rendah.

Di samping persoalan kesehatan dan produktivitas, lansia juga rentan menjadi korban kejahatan, khususnya penipuan digital yang belakangan kerap terjadi. Tahun 2022 hanya 1 dari 5 orang lansia yang dapat menggunakan internet. Karenanya, penguatan literasi digital sangat penting bagi lansia di tengah gempuran teknologi dan informasi saat ini.

Semua Pihak Ikut Berperan

Potret lansia di Indonesia saat ini tentu menjadi pijakan dalam menyongsong era penuaan penduduk di masa mendatang. Seluruh elemen baik pemerintah hingga masyarakat jangan sampai gagal memahami situasi baru ini.

Kebijakan pemerintah terkait lansia secara umum diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Guna mengantisipasi era penuaan penduduk, pemerintah telah menyusun strategi melalui RPJMN 2020-2024 dengan target peningkatan Kawasan ramah lansia. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan (Stranas Kelanjutan).

Meski demikian, merespon fenomena penuaan penduduk di Indonesia tidak hanya dilakukan dengan formulasi kebijakan tunggal, mengingat periode penuaan penduduk di masing-masing wilayah juga tidak sama. Kondisi lansia di perkotaan dan pedesaan tentu berbeda. Selain itu, persentase penduduk lansia juga tidak merata. Tahun 2022 sebanyak 8 provinsi yang sudah masuk dalam era penuaan penduduk, dengan proporsi lansia terbesar di Provinsi DI Yogyakarta (16,69 persen) dan terendah di Provinsi Papua (5,02 persen).

Berbagai pengalaman dapat dipetik dari negara-negara yang telah berhasil menghadapi penuaan penduduk di antaranya pentingnya meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, memperluas partisipasi kerja dan mengupayakan pemerataan penduduk.

Selain program pemerintah, diperlukan penguatan keluarga sebagai rumah bagi para lansia. Kehadiran keluarga berdampak positif bagi lansia. Kebutuhan akan perawatan (caregiver) dan pekerjaan untuk perawatan itu sendiri (carework) akan meningkat di masa mendatang.

Dukungan masyarakat terhadap strategi dan kebijakan pemerintah mengenai lansia juga diperlukan. Masyarakat jangan lagi keliru memandang lansia. Paradigma masyarakat mengenai lansia harus disesuaikan dengan realitas demografi saat ini. Lansia tidak boleh dianggap sebagai beban tetapi diperlakukan sebagai orang yang terhormat dan dapat aktif berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat.

Bagi penduduk yang saat ini masih di usia produktif, mulailah menjaga kesehatan fisik, mental dan finansial agar tidak 'merepotkan' di masa tua nanti. Baik lansia maupun calon lansia harus dapat menjadi subjek yang berdaya, bukan lagi sebagai objek yang tak berdaya, sehingga dapat terus berkontribusi dalam pembangunan.

Melonjaknya penduduk lansia di masa mendatang merupakan suatu keniscayaan ketika saat ini jumlah penduduk usia produktif melimpah. Bonus demografi yang tengah kita nikmati dapat diperpanjang menjadi bonus demografi kedua jika lansia dapat turut serta menjadi aktor

pembangunan. Kita semua berperan mempersiapkan lansia berkualitas demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

Artikel ini telah dimuat pada media TIMES Indonesia pada Kamis, 19 Oktober 2023

Link tayang: <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/473082/penuaan-penduduk-dan-potret-lansia-indonesia>

<https://sumut.bps.go.id>

BAB V

Kualitas Data



KEBIJAKAN BERBASIS DATA BERKUALITAS

Oleh : Jimmy Saputra Sebayang

Ringkasan

Untuk melahirkan sebuah kebijakan yang efektif, tepat sasaran dan powerful, peranan data sangat penting dan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Data yang valid dan berkualitas tentu akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas pula. Sebaliknya, data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang lambat dan tidak produktif. Karenanya diperlukan penjaminan dan peningkatan kualitas data statistik sektoral yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: *data berkualitas, data sektoral, kebijakan berbasis data*

Data seyogianya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pemanfaatannya juga sepatutnya tidak terbatas sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian pembangunan. Lebih jauh lagi, untuk menghasilkan kebijakan berkualitas, data semestinya digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga program yang dibuat tetap sejalan dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, pemerintah melakukan evaluasi pembangunan kualitas hidup manusia dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh BPS. Indeks tersebut merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Demi menaikkan IPM, dibentuk kebijakan untuk menekan jumlah kematian penduduk karena penyakit rabies. Dijalankan program vaksinasi anti rabies kepada hewan liar.

Tentu saja program ini sangat baik dan tidak salah jika dalam konteks memperkecil angka kematian secara umum. Namun jika dikaitkan dalam konteks meningkatkan IPM pada bidang kesehatan, sangat kecil sekali kaitannya. IPM di komponen harapan hidup tidak mencakup harapan hidup secara umum, tetapi dibatasi pada harapan hidup waktu lahir yang besarnya ditentukan oleh besaran angka kematian bayi. Maka, untuk mempercepat kenaikan angka IPM, mengapa tak fokus ke hal-hal pokok yang terkait langsung dengan angka kematian bayi?

Karenanya dalam rangka pembangunan kualitas hidup manusia, kebijakan yang dibuat semestinya sejalan dengan data serta indikator pembentuk IPM. Misalnya, data menunjukkan mayoritas penduduk usia tiga puluhan di suatu wilayah hanya tamatan SD. Dilahirkanlah program

kejar paket di wilayah tersebut. Jika penduduk tersebut berhasil meningkatkan pendidikannya, tentu saja rata-rata lama sekolah akan meningkat yang pada akhirnya meningkatkan capaian IPM.

Oleh karena itu, untuk melahirkan sebuah kebijakan yang efektif, tepat sasaran dan powerful, peranan data sangat penting dan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Selain itu, data yang valid dan berkualitas tentu akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas pula. Begitu pun sebaliknya, data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang lambat dan tidak produktif. Lebih parah lagi, tanpa data akan melahirkan kebijakan yang salah sasaran dan bahkan tidak nyambung sama sekali. Pertanyaannya, apakah data yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan sudah berkualitas?

Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Nyatanya, tidak semua data dihasilkan oleh BPS. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa BPS bertanggung jawab menyelenggarakan statistik dasar untuk keperluan yang bersifat luas, berskala nasional dan makro. Sementara untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok instansi yang bersangkutan, K/L maupun Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan statistiknya masing-masing yang disebut Statistik Sektoral. Namun ada terdapat tantangan untuk menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas.

Tantangan pertama, sarat kepentingan. Data sektoral, misalnya pada tingkat daerah, dihasilkan oleh perangkat daerah sesuai urusannya. Contohnya, data jumlah bayi ber gizi buruk oleh Dinas Kesehatan. Data tersebut biasanya menjadi ukuran keberhasilan pada bidang kesehatan. Semakin bertambah jumlahnya, tentu menandakan kegagalan penanggulangan gizi buruk dan menjadi rapor merah bagi pemerintah setempat. Karenanya, jika tidak sesuai yang diharapkan, apakah masih dimungkinkan untuk menyajikan data sektoral apa adanya?

Tantangan kedua, minimnya SDM statistik pada Pemerintah Daerah. Meskipun saat ini, data digadag-gadag lebih berharga dari pada minyak. Nyatanya, belum semua elemen pemerintah menaruh perhatian terhadap pentingnya data. Ini terlihat dari minimnya pemenuhan SDM statistik pada pemerintah-pemerintah daerah. Padahal kunci keberhasilan dari penyelenggaraan statistik sektoral tentu saja ditentukan oleh SDM-nya. Bagaimana kita bisa mengharapkan data sektoral berkualitas jika penyelenggaraan statistik tidak dilakukan sesuai dengan prinsip statistik yang benar karena sdm yang kurang memumpuni?

Tantangan ketiga, konsep dan metodologi. Untuk menghasilkan data yang akurat, tentu harus dilakukan dengan cara yang tepat. Misalnya dalam menentukan jumlah sampel dan responden, ada aturan dan kaidahnya. Sering sekali hal ini kurang dipahami, sehingga beranggapan dapat ditentukan

secara bebas sesuai dengan keinginan hati. Padahal dalam penyelenggaraan statistik, ada tahapan yang seyogianya harus dilakukan. Tahapan yang umum dilakukan untuk menghasilkan statistik yang berkualitas dan telah menjadi rujukan kantor statistik nasional di dunia adalah Generic Statistical Business Process Model. Tanpa proses bisnis dan metodologi yang tepat, tentu data yang dihasilkan tidak akurat.

Mengatasi tantangan tersebut, untuk menghasilkan data berkualitas, Implementasi Perpres No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) sudah seharusnya dilakukan pada semua elemen pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pada tingkat daerah, Pemerintah Daerah seharusnya sudah membentuk dan menetapkan Walidata Daerah sebagaimana diatur dalam perpres tersebut. Namun nyatanya, meski sudah empat tahun sejak perpres tersebut diundangkan, masih terdapat Pemerintah Daerah yang belum melaksanakannya. Padahal Walidata Daerah memiliki peranan penting. Kehadirannya menjadi ujung tombak bagaimana kegiatan statistik di Pemerintah Daerah dilakukan. Termasuk menjawab tantangan pertama untuk mengawal kualitas dan memeriksa kesesuaian data-data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.

Selanjutnya melalui Perpres tersebut, BPS ditunjuk sebagai Pembina Statistik Sektoral. Menjawab tantangan yang ada, BPS hadir dan berkomitmen membantu Pemerintah baik pada Tingkat Pusat maupun Daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas. Salah satunya melalui Rekomendasi Statistik sebagaimana diatur pada Perpres tersebut dan PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Dimana disebutkan setiap penyelenggaraan statistik sektoral wajib untuk memberitahukan rencana penyelenggaraan kepada BPS dan mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.

Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa konsep, metodologi, serta tahapan kegiatan statistik yang akan dilakukan sudah sesuai dan benar. Dengan masih terbatasnya sdm dan pengetahuan tentang statistik, BPS juga berkomitmen untuk membantu penyusunan metodologi dalam rangka pembinaan statistik sektoral. Harapannya, data yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, akurat dan berkualitas.

Namun sayangnya, tingkat kesadaran Pemerintah Daerah akan pentingnya data berkualitas masih rendah. Ini dapat terlihat dari minimnya perangkat daerah yang mengajukan rekomendasi dari kegiatan statistik yang dilakukannya kepada BPS. Padahal dari pengajuan tersebut, BPS dapat melihat kelayakan dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan statistik yang dilakukan. Harapannya, dari penyelenggaraan statistik berkualitas akan menghasilkan data berkualitas pula. Dengan demikian, dari data berkualitas akan melahirkan kebijakan berkualitas pula.

Kebijakan Berbasis Data Berkualitas

Oleh: Jimmy Saputra Sebayang

Data seyogianya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pemanfaatannya juga sepatutnya tidak terbatas sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian pembangunan. Lebih jauh lagi, untuk menghasilkan kebijakan berkualitas, data semestinya digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga program yang dibuat tetap sejalan dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, pemerintah melakukan evaluasi pembangunan kualitas hidup manusia dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh BPS. Indeks tersebut merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Demi menaikkan IPM, dibentuk kebijakan untuk menekan jumlah kematian penduduk karena penyakit rabies. Dijalankan program vaksinasi anti rabies kepada hewan liar.

Tentu saja program ini sangat baik dan tidak salah jika dalam konteks memperkecil angka kematian secara umum. Namun jika dikaitkan dalam konteks meningkatkan IPM pada bidang kesehatan, sangat kecil sekali kaitannya. IPM di komponen harapan hidup tidak mencakup harapan hidup secara umum, tetapi dibatasi pada harapan hidup waktu lahir yang besarnya ditentukan oleh besaran angka kematian bayi. Maka, untuk mempercepi kenaikan angka IPM, mengapa tak fokus ke hal-hal pokok yang terkait langsung dengan angka kematian bayi?

Karena dalam rangka pembangunan kualitas hidup manusia, kebijakan yang dibuat semestinya sejalan dengan data serta indikator pembentuk IPM. Misalnya, data menunjukkan mayoritas penduduk usia tiga puluhan di suatu wilayah hanya tamatan SD. Dilahirkanlah program kejar paket di wilayah tersebut. Jika penduduk tersebut berhasil meningkatkan pendidikannya, tentu saja rata-rata lama sekolah akan meningkat yang pada akhirnya meningkatkan capaian IPM.

Oleh karena itu, untuk melahirkan sebuah kebijakan yang efektif, tepat sasaran dan powerful, peranan data sangat penting dan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Selain itu, data yang valid dan berkualitas tentu akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas pula. Begitu pun sebaliknya, data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang lambor dan tidak produktif. Lebih parah lagi, tanpa data akan melahirkan kebijakan yang salah sasaran dan bahkan tidak nyambung sama sekali. Pertanyaannya, apakah data yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan sudah berkualitas?

Peningkatan Kualitas Data

Nyatanya, tidak semua data dihasilkan oleh BPS. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa BPS bertanggung jawab menyelenggarakan statistik dasar untuk keperluan yang bersifat luas, berskala nasional dan makro. Sementara untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok instansi yang bersangkutan, maupun Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan statistiknya masing-masing yang disebut Statistik Sektoral. Namun ada terdapat tantangan untuk menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas.

Tantangan pertama, sarat kepentingan. Data sektoral, misalnya pada tingkat daerah, dihasilkan oleh perangkat daerah sesuai urusannya. Contohnya, data jumlah bayi bergizi buruk oleh Dinas Kesehatan. Data tersebut biasanya menjadi ukuran keberhasilan pada bidang kesehatan. Semakin bertambah jumlahnya, tentu menandakan kegagalan penanggulangan gizi buruk dan menjadi rapor merah bagi pemerintah setempat. Karenanya, jika tidak sesuai yang diharapkan, apakah masih dimungkinkan untuk menyajikan data sektoral apa adanya?

Tantangan kedua, minimnya SDM statistik pada Pemerintah Daerah. Meskipun saat ini, data digadagadangi lebih berharga dari pada minyak. Nyatanya, belum semua elemen pemerintah menaruh perhatian terhadap peninjauan data. Ini terlihat dari minimnya pemenuhan SDM statistik pada pemerintah daerah. Padahal kunci keberhasilan dari penyelenggaraan statistik sektoral tentu saja ditentukan oleh SDM-nya. Bagaimana kita bisa mengharapkan data sektoral berkualitas jika penyelenggaraan statistik tidak dilakukan sesuai dengan prinsip statistik yang benar karena sdm yang kurang memumpuni?

Tantangan ketiga, konsep dan metodologi. Untuk menghasilkan data yang akurat, tentu harus dilakukan dengan cara yang tepat. Misalnya dalam menentukan jumlah sampel dan responden, ada aturan dan kaidahnya. Sering sekali hal ini kurang dipahami, sehingga beranggapan dapat ditentukan secara bebas sesuai dengan keinginan hati. Padahal dalam penyelenggaraan statistik, ada tahapan yang seyogianya harus dilakukan. Tahapan yang umum dilakukan untuk menghasilkan statistik yang berkualitas dan telah menjadi rujukan kantor statistik nasional di dunia adalah Generic Statistical Business Process Model. Tanpa proses bisnis dan metodologi yang tepat, tentu data yang dihasilkan tidak akurat.

Mengatasi tantangan tersebut, untuk menghasilkan data berkualitas, Implementasi Perpres No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) sudah seharusnya dilakukan pada semua elemen pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pada tingkat daerah, Pemerintah Daerah seharusnya sudah membentuk dan menetapkan Walidata Daerah sebagaimana diatur dalam perpres tersebut. Namun nyatanya, meski sudah empat tahun sejak perpres tersebut diundangkan, masih terdapat Pemerintah Daerah yang belum melaksanakannya. Padahal Walidata Daerah memiliki peranan penting. Kehadirannya menjadi ujung tombak bagaimana kegiatan statistik di Pemerintah Daerah dilakukan. Termasuk menjawab tantangan pertama untuk mengawal kualitas dan memeriksa kesesuaian data-data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.

Selanjutnya melalui Perpres tersebut, BPS ditunjuk sebagai Pembina Statistik Sektoral. Menjawab tantangan yang ada, BPS hadir dan berkomitmen membantu Pemerintah baik pada Tingkat Pusat maupun Daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas. Salah satunya melalui Rekomendasi Statistik sebagaimana diatur pada Perpres tersebut dan PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Dimana disebutkan setiap penyelenggaraan statistik sektoral wajib untuk memberibahikan rencana penyelenggaraan kepada BPS dan mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa konsep, metodologi, serta tahapan kegiatan statistik yang akan dilakukan sudah sesuai dan benar. Dengan masih terbatasnya sdm dan pengetahuan tentang statistik, BPS juga berkomitmen untuk membantu penyusunan metodologi dalam rangka pembinaan statistik sektoral. Harapannya, data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, akurat dan berkualitas.

Namun sayangnya, tingkat kesadaran Pemerintah Daerah akan pentingnya data berkualitas masih rendah. Ini dapat terlihat dari minimnya perangkat daerah yang mengajukan rekomendasi dari kegiatan statistik yang dilakukannya kepada BPS. Padahal dari pengajuan tersebut, BPS dapat melihat kelayakan dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan statistik yang dilakukan. Harapannya, dari penyelenggaraan statistik berkualitas akan menghasilkan data berkualitas pula. Dengan demikian, dari data berkualitas akan melahirkan kebijakan berkualitas pula. ***

Penulis adalah Pengkaji Statistik di BPS Kabupaten Karo

Masihkah Relevan Ratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau?

Oleh: Anggi Maisarah, SH

Sudah 20 tahun berlalu sejak aturan pengendalian konsumsi tembakau dituangkan dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hingga kini, Indonesia masih menjadi satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi konvensi ini, padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat sebagai anggota panitia perumusan (drafting committee).

lebih tajam. Dengan meratifikasi FCTC tentu berarti melakukan upaya pemenuhan hak kesehatan bangsa.

Setiap orang berhak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya atas hak kesehatan. Hal ini karena kesehatan merupakan salah satu hak yang sangat fundamental. Seseorang yang tidak sehat akan mengganggu hak lainnya, termasuk hak untuk menjalani pekerjaan, hak untuk berserikat dan

Kesehatan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Meskipun terdapat amanat dalam Undang-Undang ini agar setiap kabupaten/kota memiliki peraturan daerahnya mengenai KTR, tetapi masih banyak ditemukan kabupaten/kota yang belum menganggapnya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Tercatat oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, pada tahun

STATISTIK BERKUALITAS UNTUK INDONESIA MAJU

Oleh : Liza Aufia Utami Br Ginting, SST, M.Sc

Ringkasan

Tanggal 26 September adalah peringatan Hari Statistik Nasional di Indonesia. Semangat peringatan hari statistik Tahun 2023 mengusung tema 'Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju'. Saat ini pemerintah tengah membenahi ekosistem data di Indonesia. Dengan demikian, ke depannya data berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi seluruh penyelenggara pemerintahan.

Kata kunci: *Hari Statistik, BPS, EPSS, HSN*

Setiap tanggal 26 September, Hari Statistik Nasional diperingati di Indonesia. Peringatan Hari Statistik ini berasal dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik di Indonesia pada tanggal 26 September 1960. Penetapan ini tentunya menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan statistik di Indonesia, dimana sebelumnya kegiatan statistik di Indonesia masih mengadopsi aturan dari peninggalan Pemerintah Belanda. Dalam prosesnya juga terdapat perubahan-perubahan kelembagaan penyelenggara statistik, dari Directeur Van Landbouw Nijverheid en Handel di Tahun 1920 hingga menjadi Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 1997.

Hari Statistik Nasional diperingati untuk memberikan makna tentang pentingnya peran statistik pada proses pembangunan bangsa Indonesia. Pada tema peringatan tahun ini, Hari Statistik Nasional mengusung 'Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju'. Tema ini menggambarkan seberapa penting statistik pada upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Bukan omong kosong, sebab tanpa data statistik, kemajuan bangsa hanya cita-cita yang tidak bisa diukur dengan nyata.

Mungkin acapkali orang-orang akan mengernyitkan dahi ketika mendengar kata statistik. Statistik mungkin akan menjadi suatu hal yang tidak familiar dan sulit dimengerti bagi sebagian besar masyarakat. Angka-angka, data, analisis, interpretasi, dan berbagai bayangan kesulitan lainnya mungkin akan terlintas di benak saat berbicara tentang statistik. Padahal statistik tidak melulu begitu.

Dalam contoh yang sederhana, statistik adalah kita yang memiliki lebih banyak baju warna tertentu di lemari. Atau kita yang memilih makanan berkuah lebih sering di saat musim hujan. Atau saat kita mencicipi sesendok dari sekuali besar masakan yang kita buat. Atau seberapa banyak beras yang harus kita beli setiap belanja bulanan. Atau keputusan-keputusan lain yang akan kita pilih saat

suatu kondisi tertentu terjadi. Data statistik itu akan senantiasa kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita, meskipun mungkin kita tidak menyadarinya.

Dalam skala penyelenggaraan negara, tentu saja pemerintah harus menggunakan data statistik yang berkualitas dalam berbagai prosesnya. Mulai dari perencanaan pembangunan, menentukan kebijakan-kebijakan mana yang prioritas, hingga mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan, semuanya membutuhkan data statistik. Coba bayangkan jika semua proses pembangunan tersebut tidak menggunakan data yang berkualitas. Apa jadinya proses pembangunan tanpa perencanaan yang berbasis data. Apalagi saat ini untuk mengukur tercapainya program dan kebijakan yang dilaksanakan, pemerintah harus akuntabel dan berdasar pada bukti nyata (evidence based policy).

Lantas, apakah Badan Pusat Statistik (BPS) adalah satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab pada ketersediaan data statistik? Jika ada data statistik yang tidak up to date atau tidak tersedia untuk persoalan-persoalan tertentu, apakah ini kesalahan BPS? Bagaimana dengan masalah data yang membingungkan, dimana untuk satu indikator bisa terdapat perbedaan angka-angka dari berbagai instansi/lembaga yang mengeluarkan data tersebut, apakah itu pertanda data kita tidak berkualitas?

Saat ini pelan-pelan pemerintah tengah membenahi ekosistem data di Indonesia. Pada Tahun 2019, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Prinsip Satu Data Indonesia ini mencakup empat hal. Pertama, terdapat standar yang mengatur metodologi baik itu konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan dari data yang dikumpulkan. Kedua, terdapat metadata yang berupa informasi terstruktur yang menjelaskan tentang isi dan sumber data. Sehingga data tersebut mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali. Ketiga, prinsip interoperabilitas, dimana data dapat dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi. Dan keempat, terdapat kode referensi data induk sebagai kode identitas unik data. Sehingga dari manapun data tersebut berasal, jaminan kualitas datanya dapat dinilai.

Selain itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan terkait penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tertentu, pemerintah juga mulai mendorong terselenggaranya kegiatan statistik sektoral. BPS dalam tugas dan fungsinya hanya menyelenggarakan kegiatan yang menghasilkan statistik dasar. Statistik dasar tersebut diperoleh melalui kegiatan sensus 10 tahunan ataupun survei-survei yang rutin diselenggarakan oleh BPS. Sementara statistik sektoral harus dihasilkan oleh masing-masing lembaga/instansi sesuai dengan kebutuhan dan tugas pokoknya. Dalam menghasilkan data statistik sektoral ini, BPS selaku pembina penyediaan data statistik sektoral turut mengawal, namun upaya-upaya penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab lembaga/instansi masing-masing sebagai produsen data.

Sejak Tahun 2022, BPS memulai pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Statistik Sektoral (EPSS) di seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan statistik sektoral dan menghasilkan indikator pengukuran pembangunan statistik sektoral yang disebut Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Melalui indikator tersebut, nantinya kita akan melihat potret seberapa besar capaian pembangunan dalam bidang perstatistikan nasional. Selain itu IPS juga menjadi monitor capaian tingkat kemajuan dan profesionalitas lembaga/instansi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

Statistik pada akhirnya bukan hanya milik BPS. Kolaborasi tentunya menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem yang baik untuk data statistik di Indonesia. Satu Data Indonesia, penyelenggaraan statistik sektoral, dan berbagai upaya lainnya adalah bukti nyata keinginan kita dalam mewujudkan statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Selamat Hari Statistik Nasional!

[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2023/09/26/173480/statistik_berkualitas_untuk_indonesia_maju/

BAB VI

Penyelenggaraan Statistik



MENYOAL SPBE DAN AMANAT SDI

Oleh : Aan Willyana

Ringkasan

Era pemerintahan modern adalah pemerintahan yang bersih dan inovatif. Tuntutan Satu Data menjadi prioritas capaian yang ingin diraih. Tulisan ini berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan serta peran BPS sesuai amanat perpres no 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kata kunci: *egovernement, spbe, sdi, satu data*

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Tata kelola pemerintahan ini diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi.

Revolusi teknologi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi penyelenggaraan pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE ini. SPBE juga memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas juga diharapkan dapat mengalami peningkatan, dan di sisi lain, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan, baik dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) juga merupakan transformasi dari era *e-Government* menuju *i-Government (Integrated Government)*.

I-Government merupakan penerapan *smart government* dimana sistem saling terintegrasi satu sama lain sehingga antar dapat berinteraksi dan menghasilkan data yang saling mendukung

dalam prosesnya. Data yang dihasilkan dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dan penyelesaian masalah di berbagai daerah.

Meski, SPBE bukanlah hal yang baru, namun hingga saat ini, pelaksanaan SPBE dirasa masih belum optimal. Pada evaluasi pemantauan dan penyelenggaraan SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan-RB pada tahun 2022, tingkat kematangan yang diperoleh dalam penyelenggaraan SPBE secara nasional adalah 2,34 dari skala 5 dan berada dalam kategori cukup. Hasil ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPBE secara nasional masih terdapat berbagai kendala dan hambatan yang harus segera diselesaikan.

Paradigma SPBE semestinya bukan lagi semangat membangun aplikasi, melainkan mengutamakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi, mengkonsolidasikan aplikasi menjadi *platform* digital terpadu baik di internal maupun antar-instansi, serta interoperabilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE.

Sejalan dengan hal itu, pada 2019, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan tersebut diharapkan dapat mengatasi perbedaan data akibat tidak terintegrasinya antar sektor. Satu Data Indonesia mengatur tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, terverifikasi, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dibagikan.

Perpres tersebut juga mengatur keterlibatan berbagai kementerian, badan dan lembaga dalam naungan Forum Satu Data Indonesia. Forum tersebut sekaligus menjadi wadah komunikasi, kolaborasi dan koordinasi, baik instansi pusat dan/atau instansi daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Berbagai jenis data yang diatur dalam SDI diantaranya adalah Data Geospasial di bawah binaan Badan Informasi Geospasial, Data Keuangan di bawah binaan Kementerian Keuangan serta Data Statistik dengan Pembina data Badan Pusat Statistik (BPS).

Salah satu tujuan SDI adalah memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data. Badan Pusat Statistik yang diamanahkan sebagai Pembina data statistik telah menerbitkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan standar data statistik bagi instansi pusat dan/atau instansi daerah serta mendukung sistem statistik nasional dan satu data Indonesia. Disebutkan bahwa

data yang dihasilkan oleh produsen data harus memedomani empat prinsip, yaitu: Memenuhi standar data, Memiliki metadata, Memenuhi kaidah interoperabilitas data serta Menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Oleh karenanya, Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, baik secara mandiri atau bersama dengan Badan.

Dalam perjalanannya, kini BPS juga telah menerbitkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Hal ini dimaksudkan agar capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral dapat terukur, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas data dan akan berdampak pada kualitas pelayanan publik di bidang statistik.

Baik SPBE maupun SDI, sesungguhnya memiliki keterkaitan yang mendukung satu sama lain. Tata kelola pemerintahan yang melayani publik, harus dibarengi dengan data yang berkualitas dan pelayanan yang maksimal. Meskipun berbagai kebijakan seolah berjalan *parallel* dan terpisah, namun pada akhirnya keduanya akan mencapai *i-government* yang diharapkan.

[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2023/09/21/173347/sistem_pemerintahan_berbasis_elektronik_dan_amanat_satu_data_indonesia/

DATA SEKTORAL DAN IMPIAN GOOD GOVERNANCE

Oleh : Liza Aufia Utami Br Ginting, SST, M.Sc

Ringkasan

Good governance adalah cita-cita semua bangsa, termasuk Indonesia. Dalam upaya mengukur sejauh mana *good governance* di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga negara penyelenggara perstatistikan di Indonesia hadir untuk mengurai salah satu proses perwujudan *good governance* tersebut, melalui pembinaan statistik sektoral. BPS sebagai pembina data statistik akan menilai sejauh mana kematangan penyelenggaraan statistik sektoral lembaga pemerintahan.

Kata kunci: *sektoral, good governance, data, BPS*

Warga negara manapun di dunia ini pasti memiliki keinginan untuk hidup nyaman dan sejahtera, apapun suku, agama, pekerjaan, latar belakang, atau karakteristik lainnya. Kehidupan yang terjamin tersebut tidak hanya dirasakan untuk saat ini, namun keyakinan untuk kehidupan di masa depan. Tidak ada kekhawatiran bagi anak cucunya untuk melanjutkan hidup. Sederhana hidup sebagai bagian dari satu ekosistem negara yang diayomi dengan baik oleh pemerintahannya saat ini dan nanti. Negara hadir sebagai pelaksana ketertiban, perlindungan, peradilan, dan pencipta kemakmuran dan kesejahteraan.

Cita-cita *good governance* di Indonesia muncul sejak era reformasi, dimana Indonesia telah mengalami fase kesulitan dalam menangani masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemerintahan di masa orde baru. Indonesia punya cita-cita mewujudkan *good governance* dimana pemerintah, warga negara, dan sektor swasta berkolaborasi dan sepakat untuk menyelenggarakan tata kelola negara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi tersebut tentunya dikelola oleh pemerintah sebagai fungsi penyelenggara negara. Dari sisi pemerintahan sendiri, *good governance* ditandai dengan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Dengan pengelolaan tersebut, harapannya apapun yang pemerintah kerjakan akan selalu berorientasi pada sebesar-besarnya kualitas kehidupan dan kesejahteraan warga negaranya.

Sejauh ini, tampak seperti mimpi-mimpi yang utopis ya *good governance* itu?

Tentu saja tampak utopis jika kita tidak menggunakan data dalam melihatnya. Dalam upaya mengukur sejauh mana *good governance* tidak hanya sekedar impian utopis, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga negara penyelenggara perstatistikan di Indonesia hadir untuk mengurai salah satu proses perwujudan *good governance* tersebut, melalui pembinaan statistik sektoral.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan instansi pemerintah yang bersangkutan tersebut. Reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya mewujudkan good governance mengharapkan outcome pembangunan dari lembaga pemerintah. Dalam prosesnya, setiap lembaga pemerintahan harus mampu memberikan kontribusi nyata pada pembangunan. Dengan adanya statistik sektoral, masing-masing instansi pemerintahan memiliki alat untuk merencanakan, mengeksekusi, hingga mengevaluasi kontribusi tersebut.

Presiden Jokowi pernah dalam salah satu pidatonya menyebutkan bahwa data adalah jenis kekayaan baru, dimana saat ini data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Pernyataan ini bukan bualan, sebab kualitas dan ketersediaan data menjadi kunci pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Tanpa data yang valid, perencanaan pembangunan tentu tidak akan berjalan baik. Tanpa data yang valid pula, kita tidak bisa melihat apakah pembangunan tersebut berhasil atau tidak. Sedemikian berharganya data, sehingga seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi instansi dan lembaga pemerintahan memiliki data sektoralnya masing-masing.

Tata kelola pemerintahan yang baik juga ditandai dengan birokrasi yang agile, menyesuaikan dengan gesit keberadaan program dan kegiatannya untuk mendorong percepatan program prioritas presiden. Tanpa kesiapan data sektoral lembaga pemerintahan tentu saja hal ini mustahil untuk dilakukan. Tuntutan untuk menghasilkan data sektoral bukan hanya agar kita dapat mengukur kontribusi nyata pada masing-masing lembaga pemerintahan terhadap pembangunan, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam penggunaan anggaran dengan efektif dan efisien.

Dalam menghasilkan data sektoral ini, BPS sebagai pembina data statistik akan menilai sejauh mana kematangan penyelenggaraan statistik sektoral lembaga pemerintahan. Tentu saja penilaian ini juga akan diikuti dengan berbagai upaya peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral tersebut. Penilaian ini nantinya akan menghasilkan angka Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang berkaitan dengan ukuran capaian reformasi birokrasi. Pada akhirnya penilaian tersebut menjadi salah satu bagian dalam mengukur sejauh mana impian good governance Indonesia. Se jauh mana pemerintahan kita berproses untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Dengan demikian, good governance di Indonesia tidak lagi tampak seperti impian yang utopis.

[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2023/09/20/173311/data_sektoral_dan_impian_good_governance/

DATA MANTAP PEMBANGUNAN

Oleh : Ridho Julandra, SST, M.Sc

Ringkasan

Pembangunan berkesinambungan membutuhkan data. Data yang juga dikenal sebagai statistik, terbagi menjadi statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. BPS berperan dalam menghasilkan statistik dasar yang merupakan penyedia utama data bagi pembangunan pemerintah. Sehingga kualitasnya sangat ditentukan oleh kinerja BPS dan juga peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam memberikan jawaban.

Kata kunci: *data, pembangunan, BPS, masyarakat*

Pembangunan berkesinambungan adalah suatu keniscayaan. Pembangunan ini harus dilakukan secara merata dari Sabang sampai Merauke. Dimana, setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Untuk itu diperlukan data sebagai dasar pembangunan. Sejauh ini, sudahkah data dijadikan dasar pembangunan?

Data juga sering dikenal sebagai statistik. Berdasarkan pemanfaatannya, statistik terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, statistik dasar biasanya berskala nasional, bersifat makro, dan memiliki ciri-ciri lintas sektoral. Dimana, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Contohnya, data penduduk, data pertanian, dan data ekonomi.

Kedua, statistik sektoral dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu. Kebutuhan yang dimaksud adalah yang terkait penyelenggaraan tugas pemerintahan sesuai tugas pokoknya. Misalnya, data minat baca penduduk, data keragaman konsumsi masyarakat, dan lain-lain.

Ketiga, statistik khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Kegiatannya diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Seperti, data kegemaran masyarakat terhadap produk tertentu.

Peran BPS dan Manfaatnya

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah sangat mengandalkan statistik dasar dan statistik sektoral. Untuk memenuhi kebutuhan statistik dasar, pemerintah bergantung pada BPS. BPS mengumpulkan data melalui kegiatan sensus dan atau survei.

Ada tiga sensus yang diselenggarakan oleh BPS yaitu Sensus Penduduk (SP), Sensus Pertanian (ST), dan Sensus Ekonomi (SE). Setiap sensus dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. SP dilaksanakan pada tahun akhiran angka nol. Terakhir dilaksanakan tahun 2020 dan berikutnya tahun 2030. ST diselenggarakan pada tahun akhiran angka tiga. Sedangkan SE dilangsungkan pada tahun akhiran angka enam.

Sesuai dengan namanya, SP mengumpulkan data karakteristik kependudukan. Seperti jumlah penduduk menurut wilayah, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, dan lain sebagainya. Bagi pemerintah, data ini dapat memberikan gambaran dalam perencanaan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, terkhusus dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Bagi sektor swasta, data kependudukan bisa digunakan untuk perencanaan produksi dan pemasaran.

Di sisi lain, ST mencatat karakteristik pertanian. Seperti jumlah petani dan petani gurem, jumlah petani menurut subsektor, luas lahan, dan lainnya. Data ini sangat membantu dalam menjawab isu strategis terkini terkait pertanian. Sehingga kebijakan pemerintah terkait pertanian akan lebih tepat. Pihak swasta juga dapat menjadikannya dasar dalam melihat peta potensi pertanian, bahkan potensi pengolahan hasil pertanian.

Sedangkan, SE menghimpun data karakteristik perekonomian. Seperti nilai dan struktur usaha dan jumlah dan struktur tenaga kerja menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha. Dengan data ini, pemerintah dapat mengetahui kendala dan prospek usaha. Hal ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan guna percepatan perekonomian. Bagi pelaku usaha, data tersebut dapat menjadi gambaran peluang dan daya saing.

Selain itu, BPS juga menyelenggarakan survei-survei secara rutin. Baik itu tahunan, semesteran, maupun bulanan. Biasanya data-data tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi pembangunan. Sebut saja angka kemiskinan dan angka pengangguran, dua angka yang paling ramai dibicarakan.

Angka kemiskinan dirilis BPS setiap semester untuk tingkat nasional dan provinsi. Sedangkan untuk level kabupaten/kota, hanya disajikan setiap tahun sekali. Angka ini bersifat makro, artinya hanya taksiran jumlah penduduk miskin tanpa dapat menyebutkan siapa saja yang tergolong miskin.

Datanya dikumpulkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pelaksanaanya didasarkan pada metode statistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari menentukan berapa banyak sampel, hingga siapa saja yang menjadi sampel. Survei ini didesain sedemikian rupa sehingga hasilnya diharapkan mampu menggambarkan keadaan sesungguhnya.

Sedangkan, angka pengangguran dikumpulkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional. Juga dirilis setiap semester untuk tingkat nasional dan provinsi. Begitu juga dengan angka tingkat kabupaten/kota yang dirilis setiap tahun sekali. Hal ini terkait dengan kecukupan jumlah sampelnya.

Angka-angka ini digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah. Pemerintah dapat mengetahui keefektifan kebijakannya. Hal ini tercermin dari perubahan angkanya dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan penganggarannya.

Peran Masyarakat

Sementara itu, masyarakat juga memiliki peranan penting dalam pembangunan. Dimana, posisinya tidak hanya sebagai objek tapi subjek pembangunan. Sehingga, masyarakat juga seharusnya memberikan data yang benar saat menjadi responden sensus maupun survei.

Harus diakui, masih terdapat masyarakat yang ragu saat menjadi responden sensus dan survei. Sebenarnya masyarakat berhak menanyakan kelengkapan petugas seperti surat tugas dan penjelasan terkait sensus atau survei tersebut. Bahkan dapat menanyakan langsung ke kantor BPS terdekat. Atau juga bisa ditanyakan melalui email BPS.

Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam sensus atau survei, semakin baik kualitas data yang dihasilkan. Semakin baik datanya semakin tepat pembangunannya. Semakin tepat pembangunannya semakin sejahtera masyarakatnya.

Sebagai penutup, Charles Babbage, matematikawan asal Inggris, pernah berkata *errors using inadequate data are much less than those using no data at all*. Artinya, kesalahan akibat menggunakan data yang tidak memadai akan lebih sedikit daripada yang tidak menggunakan data sama sekali..

[TAUTAN TAYANG ARTIKEL]

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2023/09/25/173443/data_mantap_pembangunan_tepat/

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Indonesia
Telp (62-61) 8452343, Faks (62-61) 8452773
Homepage : sumut.bps.go.id ; email: bps1200@bps.go.id